

SKRIPSI

ANALISIS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* STUDI KOMPARATIF: BANK SWASTA DAN BANK PEMERINTAH YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2023



Oleh:

ANDI FANI FIRAWATI
NPM : 2162201114

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
TAHUN 2025**

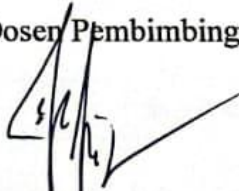
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*
Studi Komparatif: Bank Swasta Dan Bank Pemerintah Yang
Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Periode 2023

Nama Mahasiswa : Andi fani firawati
NPM : 2162201114
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

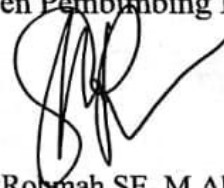
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,



Erni Setiawati, SE,ME
NIDN.1110057601

Dosen Pembimbing II,




Siti Rohmah, SE., M.Ak
NIDN.1104058402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda




Dr. M. Astri Yulidar Abbas, SE., MM
NIP.19730704 200501 1 002

Lulus Ujian Komprehensif Tanggal : Tanggal 28 Agustus 2025

HALAMAN PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Agustus 2025

Dosen Penguji

1. Erni Setiawati, SE.,M.E

1.



2. Siti Rohmah, SE.,M.Ak

2



3. Umar Hi Salim, SE.,M.M

3.



HALAMAN PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI


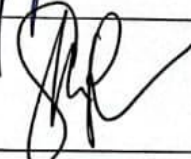

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : Andi Fani Firawati
NPM : 2162201114
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Telah melakukan revisi skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
STUDI KOMPARATIF: BANK SWASTA DAN BANK PEMERINTAH YANG
TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2023**

Sebagaimana telah disarankan oleh Dosen Penguji, sebagai berikut:

No.	Dosen Penguji	Bagian yang direvisi	Tanda Tangan
1.	Erni Setiawati SE, M.E	
2.	Siti Rohmah, SE.,M.Ak	
3.	Umar Hi salim, SE.,M M	1. Perbaikan Sistem Penulisan 2. Bab I Diperbaiki Paragraf 3. Analisis dan Pembahasan 4. Saran Disesuaikan Dengan Manfaat penelitian	

RIWAYAT HIDUP



Andi Fani Firawati; lahir di Kampung Merancang Ulu Kabupaten Berau pada tanggal 24, bulan Desember tahun 2003. Anak dari bapak Andi Marpai dan ibu Andi Kurdiawati. Menempuh pendidikan dasar tahun 2010 s.d tahun 2015 di SD Negeri 002 Gunung Tabur, melanjutkan ke SMP 002 Gunung Tabur tahun 2016 s.d tahun 2018, melanjutkan ke SMA Negeri 5 Berau pada tahun 2019 s.d tahun 2021. Pada tahun 2021 terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi.

Salam Hormat,

Andi Fani Firawati

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Studi Komparatif: Bank Swasta dan Bank Pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2023”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Kepada kedua orang tua saya terkasih Bapak Andi Marpai dan Ibu Andi Kurdiawati, orang tua saya tersayang yang sangat berjasa dalam hidup dan setiap langkah saya orang tua yang selalu mengusahakan saya untuk menempuh pendidikan setinggi tingginya. Kepada bapak saya tercinta saya ucapkan banyak terima kasih untuk setiap jerih lelah yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ditahap ini, terima kasih selalu mengusahakan kebutuhan anaknya hingga penulis tidak merasakan kekurangan apapun dalam hal apapun. Untuk mamak saya tercinta terima kasih untuk setiap doa serta motivasi yang selalu mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seorang yang berpendidikan. Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu dan setiap pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan penulis yang sangat berharga. Terima Kasih untuk segala hal yang kalian berikan penulis.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan baik dari pada pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan dan peneliti akan menerima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan berupa bimbingan, nasihat dan dukungan semangat dari beberapa pihak. Sehubungan dengan itu peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti

dalam menempuh pendidikan S1 dalam program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. Bapak Arbain, M.Pd selaku wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. Suyanto, SE., M.Si selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Alumni, Perencanaan, Kerja sama & Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. Akmad Sopian, M.P selaku Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Bapak Dr. Muhammad Astri Yulidar Abbas, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada peneliti dalam menyusun proposal skripsi ini.
6. Ibu Erni Setiawati, SE., M.E selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Siti Rohmah, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu, mendukung dan mempermudah proses peneliti untuk dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh masa pendidikan.
8. Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam yang telah membantu dan memudahkan proses administrasi dan keperluan yang dibutuhkan oleh peneliti.
9. Staf Biro Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah membantu proses administrasi peneliti selama menempuh pendidikan.
10. Kepada kakak kandung saya tercinta Andi Firda, Andi Firman dan Andi Farhan juga sepupu saya terkasih Andi septi, Andi imah, Andi putri, terima kasih karena senantiasa menjaga dan merangkul penulis dan selalu memberi semangat dan dukungan, terima kasih sudah menjadi saudara serta sahabat yang selalu ada dikala suka maupun duka, terima kasih karena tidak menganggap penulis sebagai beban melainkan mendukung juga selalu memotivasi dan menguatkan satu sama lain, hingga akhir studi.

11. Terima kasih kepada sahabat saya Satzy, Della, Cici, Hawa, Patul, Mira, Novi, Rabi, Ira terkasih yang saya sayangi karena senantiasa ada dikala penulis senang sedih stres dan duka. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada dalam kondisi apapun dan tidak menggap penulis sebagai saingan melainkan selalu memotivasi dan menguatkan satu sama lain.

Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Andi Fani Firawati, terima kasih karna sudah bertahan sampai dititik ini, dan tidak memilih untuk menyerah dikala dihadapkan dengan kesukaran. Terima kasih ya Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan jalan juga kesehatan sehingga memungkinkan saya tetap bertahan selama menjalani perkuliahan ini. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam proses penyusunan proposal skripsi yang peneliti susun, sehingga dengan senang hati peneliti menerima segala kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan proposal skripsi ini. Peneliti berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan membantu peneliti maupun bagi para pembaca.

Samarinda, Senin 24 Juni 2025

Andi Fani Firawati
NPM 2162201114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGUJI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	xiv
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II DASAR TEORI	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Tinjauan <i>Stakeholder</i>	17
2.2.1 Teori <i>Stakeholder</i>	17
2.3 Akuntansi Manajemen	19
2.4 <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>	20
2.5 Perbankan	21
2.5.1 Definisi	21
2.5.2 Fungsi Perbankan	21
2.5.3 Jenis Perbankan	23
2.5.4 Pentingnya CSR di Perbankan	24
2.5.5 <i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	24
2.5.6 Definisi laporan keberlanjutan dan laporan tahunan	28
2.6 Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Metode Penelitian	30
3.2 Definisi Operasional	30
3.3 Populasi	34
3.4 Sampel	34
3.5 Metode Analisis	35
3.5.1 Analisis Kualitatif Deskriptif	35
BAB IV GAMBARAN OBYEK PENELITIAN	38
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	38
4.2 Gambaran Obyek Penelitian	39

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Data Dan Hasil Penelitian	46
5.2 Analisis Kualitatif Deskriptif.....	46
5.2.1 Indikator Ekonomi.....	49
5.2.2 Indikator Lingkungan	52
5.2.3 Indikator Sosial.....	56
5.3 Pembahasan	61
5.3.1 Indikator Ekonomi (GRI 200).....	61
5.3.2 Indikator Lingkungan (GRI 300).....	63
5.3.3 Indikator Sosial (GRI 400).....	64
5.3.4 Pembahasan Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI Standards 2021 .	65
5.4 Perbandingan Menyeluruh antara Bank Pemerintah dan Swasta	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
6.1 Kesimpulan.....	68
6.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data CSR pada Laporan Keberlanjutan Tahun 2023	11
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1	Pemilihan Sampel.....	35
Tabel 5.1	Hasil Analisis Data 3 Indikator Utama (Ekonomi, Lingkungan dan Sosial) Bank Pemerintah Dan Swasta.....	47
Tabel 5.2	Hasil Analisis Pemenuhan Topik Pada Indikator Ekonomi GRI Standards di Perbankan Tahun 2023 Bank Pemerintah Dan swasta	50
Tabel 5.3	Hasil Analisis Pemenuhan Topik Pada Indikator lingkungan di Perbankan Tahun 2023 Bank Pemerintah Dan Bank Swasta	53
Tabel 5.4	Hasil Analisis Pemenuhan Topik Pada Indikator Sosial Berdasarkan GRI Standards di Perbankan Tahun 2023 Bank Pemerinthan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 Kerangka Konseptual	29
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel Daftar Nama Bank Swasta dan Pemerintah.....	72
Lampiran 2 Pemilihan Sampel	73
Lampiran 3 Syarat Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI 2021	74
Lampiran 4 Data Hasil pengungkapan CSR Bank Sampel Berdasarkan GRI 2021 ..	82

ABSTRAK

Andi Fani Firawati (2025), “Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Pemerintah dan Bank Swasta di Indonesia Berdasarkan GRI Standards 2021 (Studi pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2023). Dosen Pembimbing I Erni setiawati, SE.,M.E. dan Dosen Pembimbing II Siti Rohmah, SE., M.AK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) antara bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia berdasarkan Standar GRI 2021. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2023. Metode yang digunakan adalah analisis konten deskriptif terhadap 17 bank, terdiri dari 5 bank pemerintah dan 12 bank swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bank pemerintah lebih unggul dalam pengungkapan indikator sosial dan lingkungan, sedangkan bank swasta lebih menonjol pada aspek ekonomi serta inovasi keberlanjutan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor regulasi, legitimasi publik, dan tekanan pasar. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam penguatan literatur CSR serta menjadi acuan bagi regulator dan manajemen bank dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan.

Kata Kunci: csr, perbankan, bank pemerintah, bank swasta, standar gri 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan ialah bagian dari masyarakat dan berdampak yang luas terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan alam. Kegiatan bisnis yang dilakukan tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian dan keseimbangan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran terhadap pentingnya tanggung jawab sosial semakin meningkat. Perubahan pola pikir masyarakat, kemajuan teknologi, serta akses informasi yang lebih luas membuat berbagai dampak sosial dan lingkungan semakin terlihat. Berbagai tantangan, seperti kesenjangan sosial, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim, semakin menjadi perhatian. Tindakan tidak bertanggung jawab menimbulkan dampak negatif jangka panjang yang sulit untuk diperbaiki.

Peran perusahaan juga semakin besar dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas bisnis tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Masyarakat kini lebih memperhatikan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Kepercayaan publik dan reputasi sebuah entitas sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka bertanggung jawab terhadap dampak yang dihasilkan.

Regulasi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan semakin diperkuat di berbagai negara. Pemerintah dan lembaga internasional mulai mengedepankan aturan yang mengharuskan individu, organisasi, dan institusi untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan. Perubahan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar pilihan, melainkan bagian penting dari kehidupan yang harus dijalankan demi menciptakan masa depan yang lebih baik.

Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat terjaga. Kesadaran akan pentingnya memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Semua pihak memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ini, sehingga kehidupan yang lebih baik dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

Kepercayaan publik dan reputasi suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka bertanggung jawab terhadap dampak yang mereka hasilkan. Konsumen dan investor kini lebih memilih untuk mendukung entitas yang menjalankan usahanya dengan cara yang etis dan peduli terhadap masyarakat serta lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan bagi individu maupun organisasi yang menerapkannya menjalankan tanggung jawab sosial, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat terjaga.

Setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran akan dampaknya akan memberikan perubahan positif yang dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan yang akan datang. Sehingga, tanggung jawab sosial bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan Perusahaan memiliki kewajiban terhadap komunitas dan lingkungan di mana mereka beroperasi, selain tujuan profit yang mereka kejar. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep ini. TJSP merupakan istilah umum yang mencakup berbagai inisiatif dan regulasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi komunitas, lingkungan, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban yang harus dipenuhi, bukan pilihan. Hal ini sejalan dengan seruan dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional, serta pemahaman yang semakin meningkat tentang pentingnya bisnis berkelanjutan. Perusahaan dapat menggunakan CSR sebagai strategi untuk menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menyeimbangkan tujuan sosial dan komersial mereka. Dengan adanya CSR, perusahaan tidak hanya meningkatkan citra dan reputasi mereka di mata publik, tetapi juga membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah. Implementasi CSR yang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi komunitas yang menerima dampaknya.

Perusahaan wajib menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sesuai dengan UU No 40/2007 terkait Perseroan Terbatas. Hal ini terutama berlaku pada Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam untuk melakukannya. Selain itu, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

menekankan pentingnya penerapan CSR bagi investor lokal maupun internasional. Aturan ini memberikan landasan hukum bagi adopsi CSR di Indonesia.

Bank ialah organisasi komersial yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan menginvestasikannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan UU No 10/1998 terkait Perbankan. Selain mendukung perluasan sektor riil dan menjaga stabilitas ekonomi, bank merupakan penyedia layanan keuangan yang krusial, termasuk transfer, investasi, dan pembayaran. Peraturan perbankan bertujuan untuk memastikan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan resisten untuk melindungi kepentingan pelanggannya dan mendukung pengembangan ekonomi nasional dengan cara yang berkelanjutan.

Bank memainkan peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana publik. Sebagai unit yang bekerja di ekosistem sosial dan ekonomi, bank mengambil tanggung jawab sosial tidak hanya melalui keuntungan tetapi melalui CSR. Program CSR penting bagi bank karena mereka meningkatkan kepercayaan publik, membangun reputasi positif dan memastikan keberlanjutan ekonomi. Bank yang beroperasi di CSR dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan mereka karena mereka mempertimbangkan sumbu sosial, pendidikan, lingkungan dan pengembangan bisnis kecil. Selain itu, bank CSR membantu lembaga keuangan mematuhi peraturan yang harus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Bank dapat mengurangi risiko sosial dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan mereka dengan mendukung berbagai program sosial seperti kapasitas

keuangan, keuangan mikro, dan perlindungan lingkungan. Selain manfaat eksternal, CSR juga memiliki efek positif dengan meningkatkan loyalitas karyawan dan menarik lebih banyak investor dan mitra bisnis. *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah menjadi fokus utama dalam dunia bisnis modern, khususnya di sektor perbankan. CSR mencerminkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi para pemangku kepentingan. Standar Global Reporting Initiative (GRI) menyediakan panduan komprehensif bagi perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial mereka. Versi terbaru, GRI Standards 2021, menawarkan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk pelaporan keberlanjutan (Global Reporting Initiative, 2021).

Standar GRI (Global Reporting Initiative) 2021 disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB), yang merupakan lembaga independen di bawah naungan Global Reporting Initiative (GRI). GSSB bertanggung jawab atas pengembangan dan revisi standar GRI, termasuk memastikan bahwa standar tersebut sesuai dengan perkembangan terbaru dalam keberlanjutan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. GRI sendiri adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1997 dan berbasis di Amsterdam, Belanda. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang transparan dan dapat diandalkan bagi perusahaan di seluruh dunia.

Standar GRI 2021 mencakup (GRI 1), Foundation berfungsi sebagai dasar bagi perusahaan dalam memahami prinsip dan konsep utama pelaporan keberlanjutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, serta identifikasi topik material

yang relevan. pengungkapan umum (GRI 2), topik material (GRI 3), dan standar sektor spesifik. Dalam sektor perbankan, indikator seperti pengungkapan energi yang digunakan (GRI 302), emisi (GRI 305), dampak sosial (GRI 413), dan keberagaman dalam tenaga kerja (GRI 405) menjadi elemen penting dalam mengevaluasi implementasi CSR. Dengan adanya standar ini, perusahaan memiliki panduan yang lebih jelas dalam melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka.

Dengan mengelola risiko sosial dan lingkungan yang terkait dengan operasinya, industri perbankan memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selain berorientasi pada keuntungan, bank-bank pemerintah dan swasta di Indonesia juga diwajibkan untuk memberikan kontribusi konstruktif bagi lingkungan dan masyarakat. Organisasi jasa keuangan wajib menerapkan konsep keuangan berkelanjutan, seperti pengungkapan CSR, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Secara keseluruhan, pengungkapan CSR oleh bank-bank di Indonesia pada tahun 2023 mencakup berbagai aspek, mulai dari dampak ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Dengan menyediakan laporan yang transparan dan akuntabel, bank diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan, termasuk investor, masyarakat, dan regulator. Melalui upaya ini mereka tidak hanya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan membangun reputasi positif di mata publik.

Implementasi dan tingkat kepatuhan terhadap standar ini dapat berbeda antara bank pemerintah dan swasta. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti et al (2021) menunjukkan bahwa bank pemerintah memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar GRI dibandingkan dengan bank swasta. Hal ini mungkin disebabkan oleh tekanan regulasi yang lebih besar pada bank pemerintah serta pengawasan yang lebih ketat dari pemangku kepentingan publik.

Perbedaan tingkat kepatuhan terhadap standar GRI antara bank pemerintah dan bank swasta dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama. Bank pemerintah umumnya berada di bawah pengawasan ketat dari regulator serta memiliki tanggung jawab lebih besar kepentingan publik. Tekanan regulasi yang lebih tinggi ini mendorong mereka untuk lebih patuh dalam menerapkan standar pelaporan keberlanjutan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sebagai entitas yang dibiayai oleh negara, bank pemerintah sering kali menjadi sorotan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, sehingga meningkatkan insentif bagi mereka untuk mematuhi standar yang berlaku.

Bank swasta cenderung memiliki fleksibilitas lebih dalam menjalankan operasionalnya dan mungkin lebih berorientasi pada profitabilitas dibandingkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, kecuali jika ada dorongan dari investor atau tekanan pasar. Dengan demikian, perbedaan dalam tingkat kepatuhan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor regulasi, pengawasan, dan tuntutan dari pemangku kepentingan yang lebih besar pada bank pemerintah.

Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan dari investor internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga memengaruhi tingkat pengungkapan CSR. Sebagai contoh, bank-bank yang terdaftar dalam indeks keberlanjutan seperti Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang lebih baik karena adanya insentif reputasi dan akses modal yang lebih mudah (Indonesia Stock Exchange, 2021).

Pengungkapan CSR bank-bank Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial. Berbagai kegiatan dilakukan oleh bank-bank publik dan swasta, dan kegiatan tersebut didokumentasikan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan mereka. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative (GRI), laporan-laporan ini memberikan analisis mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan serta dampak sosial dan lingkungan dari operasinya.

Pengungkapan CSR dalam Standar GRI 2021 sejalan dengan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), di mana bank diwajibkan untuk melaporkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mereka jalankan. Bank pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mendukung kebijakan keberlanjutan nasional, sementara bank swasta lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi ESG mereka dengan kebutuhan bisnis dan pemangku kepentingan. Meskipun pendekatan mereka berbeda, baik bank swasta maupun bank pemerintah semakin diarahkan untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) sebagai bagian dari strategi ESG mereka.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dikatakan berhasil harus memenuhi pedoman Standar GRI 2021, yang mencakup tiga elemen utama: Pengungkapan Umum (GRI 2), Topik Material (GRI 3), dan Standar Sektor Spesifik. Dalam sektor perbankan, keberhasilan pengungkapan CSR diukur berdasarkan bagaimana bank melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam kegiatan bisnisnya secara transparan dan komprehensif.

Terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fokus program CSR, baik bank swasta maupun bank pemerintah harus memastikan bahwa laporan mereka memenuhi standar pelaporan yang ketat, mencerminkan dampak nyata terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pengungkapan CSR dapat dikatakan berhasil apabila mencakup beberapa aspek berdasarkan GRI 2021.

Aspek Ekonomi (GRI 201, GRI 207, - Dampak dan Pajak), Bank swasta melaporkan strategi keberlanjutan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk inovasi layanan keuangan berkelanjutan, serta pengungkapan mengenai kebijakan investasi berkelanjutan dan pendanaan proyek hijau. Adapun pada Bank Pemerintah, harus mengungkapkan kontribusi ekonomi lebih luas, termasuk bagaimana untuk program sosial dan pengentasan kemiskinan, transparansi dalam penggunaan dan CSR yang terkait dengan kebijakan Pembangunan nasional, seperti bagi usaha kecil (UMKM) dan program inklusif, pelaporan mengenai kepatuhan terhadap regulasi perpajakan nasional dan kontribusi pajak yang diberikan.

Aspek Lingkungan (GRI 302, GRI 305 – Energi dan Emisi), Bank Swasta mengungkap kebijakan efisiensi energi di kantor dan pusat data untuk mengurangi jejak karbon, pelaporan mengenai pendanaan proyek energi terbarukan atau obligasi hijau (green bonds), transparansi dalam upaya pengurangan emisi karbon dalam operasional dan rantai pasokan. Adapun Bank Pemerintah Mengungkap peran bank dalam pembiayaan sektor hijau yang mendukung kebijakan pemerintah terkait mitigasi perubahan iklim, pelaporan mengenai target dan pencapaian terkait emisi karbon serta kontribusi terhadap transisi energi nasional, pengungkapan terkait program keberlanjutan yang mendukung pembangunan rendah karbon.

Aspek Sosial (GRI 405, GRI 413 – Keberagaman, Dampak Sosial, dan keterlibatan Masyarakat) Bank Swasta melaporkan kebijakan inklusi keuangan dan bagaimana bank memberikan layanan kepada segmen masyarakat yang kurang terlayani, pengungkapan tentang keberagaman tenaga kerja, termasuk kebijakan kesetaraan gender dan penyertaan kelompok minoritas dalam perbankan, transparansi dalam program edukasi keuangan digital dan pelatihan bagi masyarakat. Adapun Bank Pemerintah harus mengungkap program-program yang berkontribusi langsung pada pengembangan masyarakat, seperti bantuan sosial dan peningkatan literasi keuangan bagi kelompok rentan, pengungkapan tentang keterlibatan bank dalam mendukung kebijakan pemerintah, seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program kemitraan untuk UMKM, Laporan mengenai program penguatan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan komunitas sesuai dengan mandat sosial BUMN.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan dalam pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan swasta. Salsabila (2021) mengidentifikasi bahwa bank pemerintah cenderung lebih banyak mengungkapkan indikator ekonomi dan lingkungan, sementara bank swasta lebih menekankan pada indikator sosial.

Tabel 1. 1 Data CSR pada Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 Bank Pemerintah dan Bank Swasta (Dalam Jutaan Rupiah)

Bank Pemerintah			
Nama Perusahaan	Ekonomi	Lingkungan	Sosial
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.547.911	22.664.251	97.754.879
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.336.015	84.461.843	236.169.653
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.260.349	16.447.915	50.287.924
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.007.000	3.201.000	232.113.000
PT Bank Central Asia Tbk	2.767.169	3.035.891	56.259.000
Bank Swasta			
PT Bank Central Asia Tbk	601.237.000	530.008.000	153.002.000
PT Bank Ganesha Tbk	11.696.259	5.372.000	3.392.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	242.837.000	257.571.004	221.705.032
PT Allo Bank Indoneisa Tbk	445.725.033	649.000.000	23.433.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk	2.588.508	1.728.884	856.000
PT Bank IBK Indonesia Tbk	40.927.048	414.014.000	4.401.000
PT Bank Jago Tbk	12.138.237	10.000.000	960.000
PT bank MNC Internasional Tbk	909.069.000	6.222.018	94.800.000
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	10.069.340	12.986.000	132.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.333.072	180.718.329	559.011.000
PT Bank Permata Tbk	71.478.000	390.735.000	90.570.000
PT Bank Neo Commerce Tbk	417.008.000	193.000.000	3.450.000

Sumber: www.idx.co.id, Diolah Peneliti 2024

Dilihat secara Data CSR pada laporan keberlanjutan tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan swasta. Bahwa bank

pemerintah cenderung lebih banyak mengungkapkan indicator social dan lingkungan, sementara bank swasta lebih menekankan indicator ekonomi dan lingkungan. Sebagai hasilnya, peneliti berencana menggunakan kriteria GRI 2021 untuk menganalisis lebih lanjut pengungkapan CSR pada periode 2023. Berdasarkan pedoman GRI 2021, penelitian ini membandingkan dan menganalisis pengungkapan CSR di bank pemerintah dan bank komersial Indonesia. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam pengungkapan CSR, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi regulator, investor, dan masyarakat dalam mendorong praktik CSR yang lebih transparan dan akuntabel di sektor perbankan Indonesia.

Sebagai kesimpulan, analisis pengungkapan CSR dengan menggunakan kerangka GRI 2021 menjadi alat penting untuk mengevaluasi kontribusi bank terhadap pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang sudah ada, seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017, serta landasan hukum dalam UU No 40 Tahun 2007 dan UU No 25 Tahun 2007, memberikan pijakan kuat bagi pengembangan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Demikian, diharap dapat berkontribusi penting dalam literatur CSR disektor perbankan serta membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di industri ini. Bank pemerintah dan bank komersial yang terdaftar di BEI tahun 2023 menjadi objek penelitian ini. Laporan keberlanjutan dan laporan tahunan menjadi sumber data CSR, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis konten.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

“ Bagaimana perbandingan pengungkapan CSR antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta di Indonesia periode 2023 ? “

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. **Fokus pada Bank di Indonesia**, Hanya akan membahas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah dan swasta yang terdaftar di BEI tahun 2023.
- b. **Penggunaan Standar GRI 2021** Studi ini dibatasi pada pengungkapan CSR yang dievaluasi berdasarkan standar GRI 2021, sehingga tidak mempertimbangkan standar atau pedoman pelaporan lainnya yang mungkin relevan.
- c. **Sampel Tahun 2023** Studi ini terbatas pada *sustainability report* yang diterbitkan oleh bank-bank yang terdaftar di BEI tahun 2023. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak mencakup pengungkapan CSR dari tahun-tahun sebelumnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

“Menganalisis perbandingan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta di Indonesia.”

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

a) Manfaat Akademis, mampu memberi manfaat praktis yakni:

1. Memberi dukungan empiris pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bank pemerintah dan komersial.
2. diharap mengembangkan teori legitimasi dan memperluas pengetahuan di bidang akuntansi pertanggungjawaban sosial, khususnya terkait pengungkapan CSR di industri perbankan Indonesia.

b) Manfaat Praktis, mampu memberi manfaat praktis yakni :

1. Meningkatkan pemahaman mengenai pengungkapan CSR di perbankan Indonesia.
2. Menganalisa perbedaan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

- BAB I Pendahuluan : Menguraikan penegasan judul, latar belakang batasan, rumusan masalah tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II Dasar Teori : Berisi tentang teori yang digunakan studi yang digunakan pada penelitian.
- BAB III Metodologi Penelitian : Menguraikan sampel populasi, data dan sumber terdiri dari jenis dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel. Juga menjabarkan variabel penelitian

dengan meliputi analisis data dan uji hipotesis

- BAB IV Gambaran Obyek Penelitian : Menguraikan penjelasan terkait gambaran umum perusahaan dan obyek penelitian.
- BAB V Analisis dan Pembahasan : Menganalisis data dengan 3 indikator utama Ekonomi, Lingkungan dan sosial.
- BAB VI Kesimpulan dan Saran : Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang lampau berperan sebagai referensi dalam memahami perkembangan studi terkait dengan topik yang diteliti. Dengan meninjau penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian, perbedaan metodologi, serta kontribusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan Penelitian
1.	Shafira Tsalatsa Salsabila, 2021, “Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Indonesia (Studi Komparatif Bank Pemerintah Dan Bank Swasta)”	Pengungkapan CSR, Bank Negeri, Bank Swasta	Analisis kualitatif deskriptif	Ada perbedaan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia	Perbedaan: pada waktu penelitian persamaan: pada variabel dan metode penelitian
2.	Pramudito, & Wibowo, A. 2023 “CSR Keberlanjutan: Studi Kualitatif pada Bank Indonesia”	Corporate Social Responsibility, Keberlanjutan	Kualitatif	Implementasi CSR di Bank-Bank Indonesia berkontribusi positif pada berkelanjutan ekonomi dan social.	Persamaan: Kedua penelitian menekankan pentingnya CSR dalam mendukung keberlanjutan di sektor perbankan. Keduanya menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada bank-bank di Indonesia.

					Perbedaan: Penelitian Pramudito dan Wibowo (2023) lebih spesifik dalam mengeksplorasi dampak CSR terhadap keberlanjutan
3.	Janah,A 2021 “Analisis pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab social Perusahaan Perbankan di Indonesia”.	Pelaksanaan CSR, Pengungkapan CSR	Kualitatif	Ada variasi dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara bank swasta dan bank pemerintah. Bank pemerintah cenderung lebih transparan dalam pengungkapan CSR, sedangkan bank swasta lebih fokus pada aspek pemasaran.	Persamaan: Keduanya menekankan pentingnya CSR dalam konteks perbankan dan bagaimana pengungkapan dapat memengaruhi reputasi bank. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis mendalam terhadap praktik CSR. Perbedaan: Penelitian Janah lebih fokus pada perbandingan pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara bank swasta dan Bank pemerintah

Sumber: Diolah Penulis 2025

2.2 Tinjauan Stakeholder

Tinjauan teoritis berfungsi landasan teori yang terkait dengan pokok masalah penelitian. Tinjauan ini harus mendukung kelanjutan penelitian di bab berikutnya.

2.2.1 Teori Stakeholder

Menurut teori pemangku kepentingan, pertama kali *dikenalkan Stanford Research Institute*, tahun 1963, yakni individu/organisasi berdampak/terdampak oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Menurut pandangan ini, tanggung jawab

korporat mencakup komitmen untuk memberikan nilai kepada semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, masyarakat, dan pemerintah, selain meningkatkan keuntungan bagi pemilik dan investor (pemegang saham). Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat membangun hubungan yang positif dengan para stakeholder untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan operasionalnya.

Pendekatan manajemen yang dikenal sebagai teori pemangku kepentingan menyoroti betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasinya, bukan hanya pemegang saham. Pemangku kepentingan menurut Miles (2019) yakni individu/organisasi berkemampuan mempengaruhi/terpengaruh oleh pencapaian tujuan organisasi. Strategi ini menekankan perusahaan berkewajiban tidak hanya pada pemegang saham tetapi juga terhadap komunitas lokal, pemasok, karyawan, konsumen, dan pemerintah.

Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta harapan dari berbagai stakeholder. Akibatnya, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang memprioritaskan pemberian nilai bagi semua pemangku kepentingan selain keuntungan finansial. Strategi ini sejalan dengan konsep CSR, menyatakan perusahaan harus bertindak secara etis dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Manalu et al., 2023).

Penerapan teori stakeholder dapat meningkatkan legitimasi perusahaan di mata publik dan memperkuat hubungan dengan berbagai pihak. Menurut Sasongko et al (2023), perusahaan yang mampu memenuhi ekspektasi stakeholder cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Selain itu, perusahaan

yang responsif terhadap kebutuhan stakeholder dapat mengurangi risiko konflik dan meningkatkan reputasi mereka di pasar. Namun, implementasi teori stakeholder juga menghadapi tantangan, terutama dalam mengelola konflik kepentingan antara berbagai pihak. Menurut Phillips et al. (2019), penting bagi perusahaan untuk memiliki mekanisme yang efektif dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyeimbangkan kepentingan stakeholder yang berbeda. Pendekatan yang inklusif dan transparan dalam pengambilan keputusan dapat membantu perusahaan dalam mencapai keseimbangan yang optimal antara kepentingan berbagai stakeholder.

2.3 Akuntansi Manajemen

Bidang akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi manajemen berfokus pada memberikan akses kepada manajer dalam suatu perusahaan terhadap data keuangan dan non-keuangan. Pengetahuan ini membantu dalam pengambilan keputusan efektif dan efisien, perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang lebih ditujukan kepada pihak eksternal, akuntansi manajemen bersifat internal dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Selain membantu dalam pengelolaan sumber daya dan optimalisasi biaya, akuntansi manajemen juga berkembang ke arah yang lebih luas, termasuk tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen tidak hanya mempertimbangkan efisiensi finansial tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Perusahaan dapat menggunakan akuntansi manajemen untuk mengukur dampak keberlanjutan, seperti pengurangan emisi karbon, kesejahteraan karyawan, serta investasi dalam program CSR.

Dengan demikian, akuntansi manajemen berperan sebagai alat strategis yang membantu organisasi tidak hanya dalam mencapai tujuan finansial, tetapi juga dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. Melalui penerapan konsep seperti akuntansi biaya lingkungan dan pelaporan keberlanjutan, perusahaan dapat lebih transparan dalam menunjukkan kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan, sekaligus mempertahankan daya saingnya di pasar.

2.4 Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Kemenkes mendefinisikan CSR sebagai gagasan atau tindakan dilakukan perusahaan berdasarkan rasa tanggung jawab pada konteks sosial dan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. CSR ialah komitmen perusahaan untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan lingkungan dan kualitas hidup demi kepentingan perusahaan, masyarakat lokal, dan masyarakat luas, sebagaimana dalam UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab 1, Pasal 1, Ayat 3. Menurut Totok Mardikanto (2018), CSR adalah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka serta dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. CSR didefinisikan oleh ISO 26000 sebagai pertanggungjawaban suatu organisasi atas dampak pilihan dan tindakan terhadap lingkungan dan masyarakat, yang ditunjukkan melalui perilaku terbuka dan etis yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari definisi tersebut, CSR adalah integrasi sukarela antara kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi dan hubungan perusahaan dengan pemangku

kepentingan guna mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Perbankan

2.5.1 Definisi

Menurut UU No 10/1998, perbankan mencakup hal yang berkaitan dengan bank, termasuk lembaga, operasional, dan prosedur serta teknik yang digunakan dalam menjalankan bisnisnya. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bank adalah lembaga komersial yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan dana tersebut pada masyarakat umum berbentuk kredit dan/atau bentuk lain. Bank komersial menyediakan layanan transaksi pembayaran dan beroperasi secara tradisional atau sesuai dengan prinsip syariah (www.ojk.go.id). Kata "Bank" berasal dari bahasa Italia *banca*, yang berarti tempat untuk menukarkan uang. Secara garis besar, bank adalah lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara. Lembaga ini didirikan dengan tujuan utama menerima simpanan uang, memberikan pinjaman, serta menerbitkan catatan keuangan seperti uang kertas (banknotes) (Rusnawati, 2023).

2.5.2 Fungsi Perbankan

Pengumpulan dan pendistribusian uang tunai masyarakat merupakan peran utama perbankan. Bank lebih bergantung pada uang tunai masyarakat daripada modal pemilik atau pemegang saham untuk menjalankan operasinya. Karena bank ialah lembaga terpercaya masyarakat, mereka harus selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat saat memperluas operasinya,

selain kepentingan internal mereka sendiri (Rusnawati, 2023). Secara khusus, penjelasan berikut berlaku untuk peran yang dimainkan oleh bank:

a). Agent of trust

Kepercayaan ialah landasan utama operasional perbankan, baik menerima maupun mengalokasikan uang tunai. Jika ada rasa kepercayaan, masyarakat lebih cenderung menempatkan uang mereka di bank. Mereka percaya bank tidak akan menyalahgunakan uang tersebut, uang dikelola baik, bank tidak bangkrut, dan simpanan bisa ditarik saat waktunya tiba. Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor riil tidak dapat dipisahkan dari sektor moneter. Sektor riil tidak dapat berfungsi dengan optimal jika sektor moneter tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, aktivitas bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana sangat penting untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil.

b). Agent of Development

Operasi ekonomi yang efisien di sektor riil sangat bergantung pada tindakan bank dalam mengumpulkan dan mengalokasikan uang tunai. Masyarakat dapat berinvestasi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa berkat tindakan tersebut. Karena penggunaan uang tidak terpisahkan dari investasi, distribusi, dan konsumsi, efisiensi ketiga proses ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.

c). Agent of service

Bank melayani masyarakat dengan mengumpulkan dan mendistribusikan uang serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Layanan-layanan

ini memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Contoh layanan tersebut antara lain simpanan uang, penyimpanan barang berharga, jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.5.3 Jenis Perbankan

Perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikannya, salah satunya adalah pembagian antara bank swasta dan bank negeri. Pembagian ini menentukan status pengelolaan, sumber modal, serta kebijakan yang dijalankan oleh bank tersebut.

1. Bank Pemerintah

Bank milik negara adalah bank yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber pendanaan negara lainnya menyediakan sebagian besar modal untuk bank milik negara. Selain menghasilkan keuntungan, tujuan utama bank milik negara adalah mendorong tumbuhnya ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Bank milik negara sering aktif mendukung inisiatif pemerintah, seperti mendanai proyek infrastruktur nasional atau menyalurkan pinjaman usaha kecil (KUR) (Kasmir, 2016).

2. Bank Swasta

Bank yang dimiliki oleh pihak swasta, baik individu, perusahaan, maupun kelompok investor. Modal bank swasta berasal dari dana pemilik dan sumber lain yang sah. Bank swasta berorientasi pada keuntungan dan melayani berbagai kebutuhan masyarakat melalui produk dan layanan kompetitif. Bank

swasta berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari banyak inovasi dalam produk keuangan dan layanan nasabah.

2.5.4 Pentingnya CSR di Perbankan

Corporate Social Responsibility (CSR) memainkan peran krusial dalam industri perbankan, terutama dalam meningkatkan reputasi dan citra positif bank di mata publik. Implementasi CSR yang efektif dapat memperkuat kepercayaan pelanggan, investor, dan masyarakat terhadap bank. Selain itu, CSR berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi melalui berbagai program, seperti pembangunan sarana umum, bantuan bencana alam, serta pelestarian lingkungan. Program-program ini menunjukkan tanggung jawab sosial bank terhadap

masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Widiastuti, 2023). Di era digital, pentingnya CSR semakin meningkat. Bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan data dan melindungi konsumen dari risiko siber. Melalui program CSR yang berfokus pada literasi digital, keamanan online, dan inklusi keuangan, bank dapat mendukung komunitas online dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Secara keseluruhan, implementasi CSR dalam perbankan tidak hanya meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, tapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan berkelanjutan.

2.5.5 Global Reporting Initiative (GRI)

a. Definisi *Global Reporting Initiative (GRI)*

GRI ialah sebuah organisasi internasional bersifat independen, yang berfungsi untuk membantu bisnis dan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan dampak yang mereka timbulkan. Organisasi ini menyediakan bahasa umum yang dapat digunakan secara global untuk mengkomunikasikan dampak tersebut. GRI mengembangkan standar yang dikenal sebagai GRI Standards, yang berfungsi sebagai pedoman untuk pelaporan keberlanjutan. GRI Standards mencerminkan praktik terbaik di tingkat global dalam hal pelaporan dampak tersebut ke publik. Pelaporan keberlanjutan didasarkan pada GRI Standards memberikan informasi yang relevan mengenai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan menyusun laporan sesuai dengan GRI Standards, organisasi dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai isu material, dampak yang terkait, serta strategi pengelolaan berbagai dampak tersebut.

b. Sejarah *Global Reporting Initiative (GRI)*

Setelah demonstrasi publik di Boston tahun 1997 yang menarik perhatian terhadap kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak Exxon Valdez, Global Reporting Initiative (GRI) didirikan. Kelompok ini bertujuan untuk menetapkan sistem akuntabilitas pertama memastikan perusahaan mematuhi aturan perilaku lingkungan bertanggung jawab. Ruang lingkup GRI telah meluas seiring waktu untuk mencakup aspek tata kelola, ekonomi, dan sosial (globalreporting.org). Penerapan prinsip-prinsip GRI berlangsung tahun 2000 dan masih berlanjut samapi sekarang. Kriteria tersebut telah diperbarui berkali-kali selama periode tersebut. Iterasi pertama, yang dikenal sebagai GRI

Guidelines (G1), diterbitkan tahun 2000 dan menawarkan kerangka kerja global pertama pelaporan keberlanjutan. GRI secara resmi membentuk organisasi nirlaba independen tahun 2001. Setelah pindah ke Amsterdam pada tahun 2002, GRI melakukan pembaruan besar-besaran yang menghasilkan GRI Guidelines (G2). Dengan meningkatnya permintaan laporan GRI dan adopsi oleh berbagai organisasi, pedoman ini diperluas dan ditingkatkan, yang menghasilkan Pedoman GRI (G3) pada tahun 2006, diikuti oleh Pedoman GRI (G3.1) pada tahun 2011, dan Pedoman GRI (G4) pada tahun 2013 (Salsabila, 2021).

Konsep tingkat penerapan, yang membagi laporan menjadi 3 tingkat, A, B, dan C, menurut kriteria tertentu dan jumlah indikator disediakan, masih digunakan dalam GRI Guidelines (G3.1) dan versi sebelumnya. Konsep tingkat penerapan dihapuskan dengan diperkenalkannya Pedoman GRI (G4), karena perusahaan berupaya mencapai tingkat A dengan melaporkan sebanyak mungkin indikator. Sebaliknya, laporan keberlanjutan kini lebih berfokus pada isu relevan dan material dalam konteks keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi lingkungan perusahaan serta pemangku kepentingan. GRI mulai mendirikan sejumlah kantor regional di negara-negara lain, seperti Brasil (2007), China (2009), India (2010), AS (2011), Afrika Selatan (2013), Kolombia (2014), dan Singapura (2019), sebagai respons terhadap meningkatnya keterlibatan global dalam pelaporan keberlanjutan. GRI mengalami perubahan terakhir pada tahun 2016, ketika menghentikan penyediaan panduan dan menggantinya dengan standar pelaporan

keberlanjutan internasional pertama, atau GRI Standards. Banyak perusahaan telah berhasil menerapkan GRI Standards sejak 2018 (globalreporting.org).

c. Indikator Pengungkapan GRI Standards

Dalam Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021, indikator pengungkapan adalah alat untuk membantu organisasi mengkomunikasikan dampak mereka terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan cara yang transparan dan terukur. GRI Standards memiliki indikator pengungkapan yang mencakup berbagai topik yang relevan dengan keberlanjutan dan CSR, terdiri dari 3 kategori:

1. GRI 100 (*Universal Standards*): Ini mencakup dasar umum yang berlaku untuk semua organisasi yang menggunakan GRI Standards, seperti pengungkapan tentang profil organisasi, strategi, tata kelola, etika integritas dan keterlibatan pemangku kepentingan.
2. GRI 200 (*Economic Standards*): ini berfokus pada dampak ekonomi organisasi, seperti pengungkapan terkait kinerja ekonomi, praktik pengadaan, dampak ekonomi dari perubahan iklim, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.
3. GRI 300 (*Environmental Standards*): Ini mengatur pengungkapan dengan dampak lingkungan, termasuk penggunaan sumber daya alam, limbah, emisi, serta praktik pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim. Indikator pengungkapan ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengukur dampak mereka dalam aspek yang berhubungan dengan keberlanjutan. Pengungkapan yang dilakukan

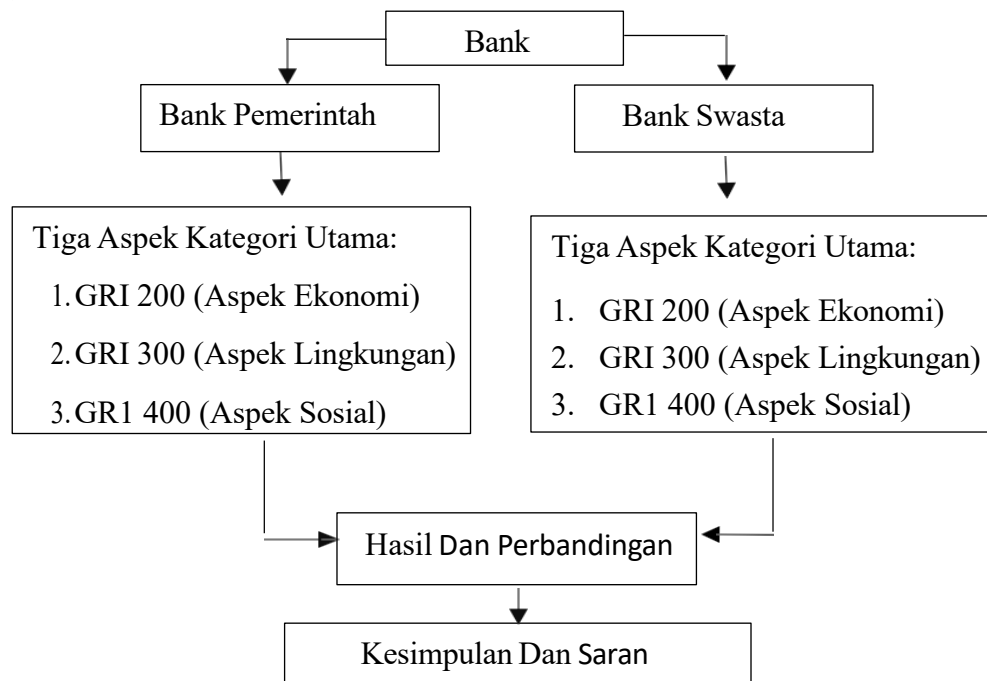
berdasarkan standar ini memberi pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, dan masyarakat umum, gambaran yang jelas tentang bagaimana organisasi mengelola isu-isu keberlanjutan yang penting.

2.5.6 Definisi laporan keberlanjutan dan laporan tahunan

Laporan keberlanjutan dan laporan tahunan merupakan dua bentuk pelaporan korporat yang saling melengkapi dalam menyampaikan informasi kinerja perusahaan. Laporan keberlanjutan (sustainability report) adalah dokumen yang memuat informasi mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan perusahaan, serta digunakan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada standar seperti GRI Standards. Sementara itu, laporan tahunan (annual report) merupakan laporan yang diterbitkan setiap akhir tahun fiskal yang berisi informasi mengenai kinerja keuangan, tata kelola, serta strategi bisnis perusahaan. Dalam beberapa kasus, informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dicantumkan dalam laporan tahunan, terutama bagi perusahaan yang belum menerbitkan laporan keberlanjutan secara terpisah.

2.6 Kerangka Konseptual

Struktur yang menggambar hubungan antara berbagai teori yang relevan dan digunakan untuk mendukung serta membimbing jalannya penelitian.



Gambar 2. 6 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah Oleh Penulis 2025

2.7 Pernyataan Penelitian

Secara data CSR pada laporan keberlanjutan tahun (2023) Bank Pemerintah cenderung lebih banyak mengungkapkan indikator sosial dan lingkungan, sedangkan Bank Swasta lebih menekankan dikategori ekonomi dan lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode ini memakai analisis kualitatif deskriptif dengan *content analysis*, adalah pendekatan untuk memahami dan menggambarkan isi atau konten dari data yang diperoleh secara mendalam, pada makna yang terkandung dalam teks, gambar, atau data lain yang relevan (Muhammad et al.,2022). Dalam penelitian ini menggunakan tabel syarat pengungkapan CSR berdasarkan GRI Standard 2021 sebagai alat bantu utama dalam proses analisis isi content analysis. Tabel tersebut berada pada lampiran memuat daftar lengkap indikator atau disclosure yang harus diungkapkan oleh perusahaan.

3.2 Definisi Operasional

Pengungkapan CSR dalam penelitian ini diartikan sebagai sejauh mana bank-bank di Indonesia pada bank pemerintah maupun swasta melaporkan aktivitas dan komitmen sosial sesuai dengan GRI Standars 2021 dalam laporan keberlanjutan menggunakan *content analysis* berdasarkan indikator GRI 2021, yang terdiri dari; GRI 100 *universal standars*, GRI 200 standar ekonomi, GRI 300 Standar Lingkungan dan GRI 400 Standar Sosial. Pengungkapan CSR dianalisis secara kualitatif melalui identifikasi jumlah dan kualitas pemenuhan indikator dalam laporan, yaitu dengan menilai apakah masing-masing indikator GRI tersebut diungkapkan atau tidak (dikodekan sebagai 1 untuk "diungkapkan" dan 0 untuk "tidak diungkapkan").

Dalam kerangka **GRI Standards 2021**, terdapat tiga indikator utama yang menjadi fondasi pengungkapan keberlanjutan, yaitu **ekonomi, lingkungan, dan sosial**. Ketiga indikator ini merepresentasikan dimensi fundamental pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal sehingga wajib diungkapkan oleh seluruh organisasi, termasuk sektor perbankan. Aspek ekonomi menekankan pada kontribusi organisasi terhadap sistem ekonomi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global, misalnya melalui penciptaan nilai ekonomi, pembayaran pajak, serta penyediaan akses pembiayaan. Aspek lingkungan berfokus pada bagaimana organisasi memengaruhi ekosistem dan sumber daya alam, termasuk penggunaan energi, emisi, limbah, serta inisiatif ramah lingkungan. Adapun aspek sosial mencakup dampak organisasi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan, seperti perlindungan hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan yang adil, keragaman dan inklusi, serta keterlibatan masyarakat. Penerapan tiga indikator utama ini memiliki signifikansi penting karena memastikan bahwa setiap organisasi mengungkapkan dampaknya secara menyeluruh terhadap tiga pilar keberlanjutan yang saling terkait.

1. GRI Standars No.100 (*Universal Standards*)

Pengungkapan yang dilakukan oleh organisasi mencakup strategi, struktur, dan praktik terkait keberlanjutan. Informasi ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk memahami alasan di balik laporan yang disampaikan oleh organisasi. Dalam pengungkapan ini, terdapat enam komponen utama, yaitu: Profil Perusahaan: Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai ukuran, lokasi geografis, dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.

- a. Strategi: strategi organisasi berkaitan dengan keberlanjutan lebih mendetail, dengan merujuk Standar GRI yang relevan.
- b. Tata Kelola: Struktur dan komposisi tata kelola dijelaskan dalam pengungkapan ini, beserta fungsi badan pengawas tertinggi, penilaian kompetensi dan kinerjanya, serta partisipasinya dalam evaluasi kinerja, pelaporan keberlanjutan, dan manajemen risiko ekonomi dan lingkungan, termasuk kompensasi dan insentif.
- c. Tata Kelola: menjelaskan struktur tata kelola dan komposisinya, termasuk peran badan pengawas tertinggi, evaluasi kinerja dan kompetensi badan tersebut, serta keterlibatannya dalam manajemen risiko, pelaporan keberlanjutan, dan penilaian kinerja ekonomi dan lingkungan, termasuk remunerasi dan insentif.
- d. Keterlibatan Stakeholders: Bagian ini menjelaskan pendekatan yang diambil oleh organisasi dalam melibatkan para pemangku kepentingan.

2. GRI *Standards* No. 200 : Dampak Ekonomi

Dampak Ekonomi mencakup enam topik yang perlu dilaporkan yaitu;

1. GRI 201: Kinerja Ekonomi (1-4)
2. GRI 202 : Keberadaan Pasar (1-4)
3. GRI 203 : Dampak Ekonomi Tidak Langsung (1-2)
4. GRI 204 : Praktik Pengadaan (1)
5. GRI 205 : Anti Korupsi (1-3)
6. GRI 206 : Perilaku Anti-Persaingan (1)

3. GRI 300 : Dampak Lingkungan

Dampak Lingkungan dari 8 topik perlu dilaporkan yakni:

1. GRI 301 : Material (1-3)
2. GRI 302 : Energi (1-5)
3. GRI 303 : Air Dan Efluen (1-5)
4. GRI 304 : Keanekaragaman Hayati (1-4)
5. GRI 305 : Emisi (1-7)
6. GRI 306 : Limbah (1-5)
7. GRI 308 : Penilaian Lingkungan Pemasok (1-2)

4. GRI Standars No. 400 (Dampak Sosial)

Dampak sosial perlu dilaporkan, yakni;

1. GRI 401 : Kepegawaian (1-3)
2. GRI 402 : Hubungan Pekerja atau Manajemen (1)
3. GRI 403 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (1-10)
4. GRI 404 : Pelatihan dan Pendidikan (1-3)
5. GRI 405: Kenaekaragaman dan Peluang Setara (1-2)
6. GRI 406: Nondiskriminasi (1)
7. GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif (1)
8. GRI 408: Pekerja anak (1)
9. GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja (1)
10. GRI 410: Praktik Keamanan (1)
11. GRI 411: Hak Masyarakat Adat (1)
12. GRI 413: Masyarakat Setempat (2)
13. GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok (2)

14. GRI 415: Kebijakan Publik (1)
15. GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan (2)
16. GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan (1-3)
17. GRI 418: Privasi Pelanggan (1)

3.3 Populasi

Populasi, menurut Sekaran dan Bougie (2017), adalah kumpulan individu, peristiwa, atau objek yang menarik minat peneliti untuk diteliti. Semua bank yang terdaftar di BEI (IDX) tahun 2023 ialah populasi studi ini. Tahun 2023 dipilih karena pada tahun tersebut, semua penyusun laporan keuangan di Indonesia diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan. (Daftar nama bank yang menjadi populasi penelitian dapat ditemukan di lampiran 1).

3.4 Sampel

Sekaran (2017) menyatakan sampel adalah bagian populasi. Peneliti dapat membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi yang lebih besar dengan mengamati sampel. Sugiyono (2017) juga menyatakan sampel ialah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan subset dari populasi. Dalam penelitian ini, Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang dikombinasikan dengan pendekatan non- probabilitas. Metode pengambilan sampel yang dikenal sebagai “purposive sampling” didasarkan pada kriteria tertentu. Sampel studi ini dipilih menurut kriteria berikut:

1. Laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang tidak dapat diakses di web idx.co.id/BEI.

2. Perusahaan terdaftar di BEI dan tidak menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2023.

Tabel 3. 1 Pemilihan Sampel

	KETERANGAN	JUMLAH
No.	Total Populasi	47
	Kriteria Penentuan Sampel	
1.	Laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang tidak dapat diakses di web idx.co.id/BEI.	(4)
2.	Perusahaan terdaftar di BEI dan tidak menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2023.	(26)
	Jumlah Sampel penelitian yang memenuhi kriteria	17

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 3.4, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 17 institusi perbankan. (Daftar lengkap mengenai populasi perusahaan perbankan beserta sampel penelitian dapat dilihat pada bagian lampiran 2).

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Kualitatif Deskriptif

Menganalisis data studi ini. Proses penelitian yang dikenal sebagai analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif berbentuk kata lisan/tertulis. Data ini adalah materi dokumenter yang dievaluasi secara kualitatif, dan analisis konten adalah pendekatan analitis yang digunakan. Ningsih dan Cheisviyanny (2019) mendefinisikan analisis konten yakni metode yang menentukan apakah suatu topik atau frasa tertentu muncul dalam satu atau lebih teks. Tujuan analisis konten adalah menemukan detail atau ciri tertentu dalam suatu teks, yang bertujuan untuk

memberikan deskripsi yang tidak bias dan metodis. Di antara banyak tugas yang terlibat dalam analisis konten adalah:

1. *Data Reduction*

Data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara rinci dan teliti, yang akan menjadi dasar pembahasan penelitian. Untuk mengevaluasi kelengkapan data yang dilaporkan dan komponen pengungkapan CSR berdasarkan Standar GRI, peneliti kemudian membuat indeks pemenuhan indikator. Indeks ini mencakup 117 indikator yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dan didasarkan pada data dari bank sampel. (Daftar indikator tersebut tersedia pada Lampiran 3 syarat pengukuran GRI 2021)

2. *Data Display*

Data disajikan berbentuk ringkasan, infografis, cuplikan, dan format penyajian lainnya. Tiga indikator pengungkapan CSR utama—ekonomi, lingkungan, dan sosial—berdasarkan Standar GRI digunakan oleh peneliti untuk menganalisis laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank sampel. Berikut adalah penjelasan rinci tentang proses analitis:

1. Mengisi tabel kepatuhan indikator sesuai temuan peneliti dan menilai kepatuhan pengungkapan menggunakan opsi GRI 100 Universal Standards: General Disclosure with Core and Topic-Specific Standards, yang mencakup tiga indikator utama, yaitu GRI 200 untuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2024.

2. Memberikan komentar dan ringkasan temuan dari tabel kepatuhan indikator CSR menurut Standar GRI untuk bank pemerintah dan komersial termasuk dalam sampel studi tahun 2024.

3. Conclusion drawing and verification

Kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis yang dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada perspektif subjektif peneliti dalam menganalisis laporan keberlanjutan dari bank yang menjadi sampel. Dalam Standar GRI 2021, terdapat 117 indikator yang dijadikan acuan dalam pelaporan keberlanjutan. Sesuai dengan ketentuan GRI 1: Foundation 2021, tidak ada persyaratan baku yang mengharuskan sebuah laporan CSR untuk memenuhi seluruh indikator agar dapat dianggap sebagai pengungkapan CSR. Organisasi hanya diwajibkan untuk mengungkapkan topik-topik material yang relevan dengan

3 indikator utama, yakni dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, tingkat pengungkapan dianggap rendah jika suatu bank hanya melaporkan sebagian kecil dari indikator yang ada. Sebaliknya, semakin banyak indikator yang diungkapkan, semakin tinggi pula kelengkapan dan kualitas pengungkapan CSR yang dilakukan.

BAB IV

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Penelitian ini difokuskan pada bank-bank yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek Indonesia periode tahun 2023, yang terdiri dari dua kategori bank pemerintahan dan bank swasta yang memiliki karakteristik, dan orientasi bisnis yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi dasar dalam membandingkan tingkat dan bentuk pengungkapan CSR antara kedua kelompok bank tersebut.

Bank pemerintah merupakan lembaga keuangan yang sebagian besar kepemilikan sahamnya berada ditangan negara dan beroperasi di bawah pengawasan langsung dari pemerintah. Peran bank pemerintahan tidak hanya difokuskan pada pencapaian laba, melainkan juga sebagai instrumen negara dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional, seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam kaitannya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bank pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk mengimplementasikan program sosial dan lingkungan sebagai bagian dari praktik bisnisnya.

Berbeda dari bank pemerintah, bank swasta adalah institusi keuangan yang dimiliki oleh individu, badan usaha, atau entitas swasta. Tujuan utama bank swasta cenderung berorientasi pada efisiensi bisnis dan profitabilitas. Namun demikian, semakin meningkatnya kesadaran sosial dan tuntutan pasar membuat banyak bank

swasta mulai menerapkan CSR sebagai strategi reputasi, loyalitas nasabah, serta daya saing jangka panjang.

Beberapa bank swasta besar di Indonesia, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank Permata Tbk, telah menyusun laporan keberlanjutan yang memuat program-program sosial, lingkungan, dan ekonomi yang terstruktur, meskipun pendekatannya lebih fleksibel dibandingkan bank milik negara. Pengungkapan CSR oleh bank swasta umumnya diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan pasar, menarik investor berkelanjutan, dan menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

4.2 Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini secara spesifik mengkaji entitas perbankan milik negara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2023. Proses analisis sampel dilakukan melalui pendekatan *purposive sampling*, yang rincian kriterianya telah dieksplorasi pada bagian metodologi sebelumnya. Penelitian ini melibatkan 17 bank yang terdiri dari bank milik pemerintah dan bank swasta sebagai sampel. Masing-masing bank tentu memiliki latar belakang pendirian, karakter operasional, dan arah strategi bisnis yang berbeda, yang turut memengaruhi bentuk serta fokus pengungkapan CSR yang dilakukan.

Berikut profil singkat pendirian dan gambaran umum program CSR yang dijalankan oleh masing-masing bank sepanjang tahun 2023:

Bank Pemerintah

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – BBNI

Didirikan pada tahun 1946, BNI merupakan bank komersial pertama yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia dan sempat berfungsi sebagai bank sentral. Sebagai bank BUMN besar, BNI memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya di sektor korporasi dan UMKM. Program CSR 2023 dijalankan melalui inisiatif BNI Berbagi yang fokus pada pemberdayaan desa, pelatihan UMKM, serta bantuan pendidikan. Selain itu, BNI juga menaruh perhatian pada kelestarian lingkungan dengan program penghijauan dan konservasi alam.

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – BBRI

BRI berdiri tahun 1895 di Purwokerto dengan orientasi awal untuk melayani kebutuhan keuangan petani kecil, sehingga memiliki basis kuat di segmen mikro. Hingga kini, BRI dikenal sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia dan menjadi motor penggerak UMKM. Program CSR 2023 diwujudkan melalui Desa BRILian, pelatihan UMKM digital, serta bantuan pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, BRI aktif memberikan bantuan tanggap darurat bencana sebagai wujud kepedulian sosial.

3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk – BBTN

BTN berdiri sejak 1897 dengan nama Postspaarbank, dan kini dikenal sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan rakyat. Fokus bisnis BTN selaras

dengan perannya dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang perumahan dan pemukiman. CSR 2023 diarahkan pada renovasi rumah tidak layak huni, program pelatihan keterampilan masyarakat, dan dukungan terhadap sektor perumahan rakyat. Melalui program ini, BTN memperkuat citra sebagai bank yang peduli terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk – BRIS

Bank Syariah Indonesia resmi berdiri tahun 2021 sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah). Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki visi menjadi bank syariah modern dan inklusif. Program CSR 2023 difokuskan pada pengembangan wakaf produktif, pelatihan pesantren, dan bantuan pendidikan berbasis syariah. BSI juga menekankan pada pemberdayaan komunitas muslim melalui kegiatan yang berlandaskan prinsip keberkahan.

5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – BJTM

Didirikan pada tahun 1961 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BJTM berperan besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Bank ini berfokus pada pembiayaan daerah, UMKM, dan layanan perbankan masyarakat. Program CSR 2023 difokuskan pada pelatihan wirausaha lokal, bantuan korban bencana, serta promosi budaya dan seni Jawa Timur. Hal ini menunjukkan komitmen BJTM dalam mengembangkan potensi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial.

Bank Swasta

1. PT Bank Central Asia Tbk – BBCA

Didirikan tahun 1957, BCA tumbuh menjadi bank swasta terbesar di Indonesia dengan kekuatan pada layanan ritel dan digital. Sebagai bank dengan basis nasabah terluas, BCA menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. CSR 2023 dijalankan melalui program Bakti BCA, meliputi konservasi lingkungan, pemberian beasiswa, serta pelatihan guru. Selain itu, BCA berperan aktif dalam literasi digital bagi pelajar untuk meningkatkan inklusi keuangan.

2. PT Bank Ganesha Tbk – BGTG

Bank Ganesha berdiri pada 1990 dengan fokus melayani segmen ritel dan UMKM. Walau tergolong bank swasta menengah, BGTG tetap berkomitmen pada pelaksanaan tanggung jawab sosial. Pada tahun 2023, CSR BGTG diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial, kampanye kesehatan masyarakat, serta kegiatan Ramadhan yang menyasar komunitas sekitar. Program ini membuktikan peran bank dalam mendukung aspek sosial meski dalam skala terbatas.

3. PT Bank Maybank Indonesia Tbk – BNIC

Didirikan pada tahun 1959 dengan nama Bank Internasional Indonesia (BII), kini menjadi bagian dari Maybank Group asal Malaysia. Sebagai salah satu bank besar, Maybank Indonesia menekankan keberlanjutan dalam strategi bisnis. Program CSR 2023 mencakup RISE (Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship) untuk penyandang disabilitas, pelatihan entrepreneur, dan

pengurangan jejak karbon. Hal ini menunjukkan integrasi CSR dengan prinsip inklusi sosial dan keberlanjutan lingkungan.

4. PT Allo Bank Indonesia Tbk – BBHI

Awalnya berdiri tahun 1992 sebagai Bank Arta Griya, lalu bertransformasi menjadi bank digital modern pada 2021. Dengan positioning digital bank, Allo Bank juga melaksanakan CSR yang relevan dengan perkembangan teknologi. Pada 2023, program CSR meliputi edukasi keuangan digital, bantuan sosial untuk komunitas terdampak bencana, serta kegiatan sosial berbasis teknologi. Strategi ini selaras dengan citra Allo Bank sebagai bank digital inovatif.

5. PT Bank Raya Indonesia Tbk – AGRO

Didirikan tahun 1989 sebagai BRI Agroniaga, kini bertransformasi menjadi bank digital anak usaha BRI dengan fokus pada ekosistem pertanian modern. Bank Raya memiliki misi mendukung petani dan UMKM dengan inovasi finansial berbasis teknologi. CSR 2023 diwujudkan melalui literasi keuangan digital bagi petani, pelatihan digitalisasi pertanian, serta dukungan UMKM desa. Program ini memperkuat identitas Bank Raya sebagai penggerak ekonomi pertanian berbasis digital.

6. PT Bank IBK Indonesia Tbk – AGRS

Bank ini berdiri tahun 1973 dengan nama Bank Harmoni sebelum diakuisisi Industrial Bank of Korea (IBK). Kini AGRS berkembang dengan visi mendukung bisnis kecil dan menengah di Indonesia. CSR 2023 diarahkan pada pelatihan tenaga kerja lokal, program pengelolaan sampah, dan edukasi

lingkungan. Fokus ini memperlihatkan komitmen IBK Indonesia untuk membangun kapasitas masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

7. PT Bank Jago Tbk – ARTO

Bank Jago berdiri tahun 1992 dan bertransformasi besar pada 2020 menjadi bank digital inovatif. Dengan pendekatan teknologi, ARTO menasar segmen milenial dan UMKM digital. CSR 2023 berfokus pada kampanye literasi digital, pelatihan keamanan transaksi, serta edukasi keuangan untuk generasi muda. Hal ini menegaskan peran Bank Jago sebagai motor penggerak literasi keuangan di era digital.

8. PT Bank MNC Internasional Tbk – BABP

Berdiri tahun 1989 sebagai Bank Bumiputera, kini menjadi bagian dari MNC Group yang bergerak di bidang media dan keuangan. Sebagai bank swasta kecil, MNC Bank tetap berupaya berkontribusi bagi masyarakat melalui CSR. Program 2023 meliputi donasi kemanusiaan, kegiatan donor darah, dan aktivitas sosial keagamaan. Meski sederhana, program ini menjadi bukti komitmen MNC Bank pada tanggung jawab sosial.

9. PT Bank Neo Commerce Tbk – BBYB

Didirikan tahun 1990 sebagai Bank Yudha Bhakti, kemudian rebranding menjadi bank digital pada 2020. Bank Neo Commerce fokus pada layanan berbasis aplikasi dengan target segmen digital native. CSR 2023 difokuskan pada edukasi keamanan siber, literasi digital untuk pelajar, dan bantuan darurat bencana. Program ini relevan dengan positioning bank digital yang mengedepankan edukasi dan perlindungan konsumen.

10. PT Bank JTrust Indonesia Tbk – BCIC

Awalnya berdiri tahun 1989 sebagai Bank Mutiara, lalu diakuisisi oleh JTrust Group asal Jepang. Sebagai bank dengan modal asing, JTrust menekankan CSR pada aspek sosial dasar. Program 2023 meliputi donasi pendidikan, penyediaan fasilitas air bersih, serta pelestarian lingkungan sekitar kantor cabang. Inisiatif ini menunjukkan kepedulian JTrust terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitar operasionalnya.

11. PT Bank Danamon Indonesia Tbk – BDMN

Didirikan tahun 1956, Bank Danamon kini menjadi bagian dari MUFG Bank Jepang. Sebagai bank besar, Danamon memiliki strategi CSR yang terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan. Program Danamon Peduli 2023 difokuskan pada dukungan sektor kesehatan, pendidikan, dan konservasi lingkungan. Upaya ini menegaskan Danamon sebagai bank yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

12. PT Bank Permata Tbk – BNLI

Bank Permata berdiri tahun 1954 dan sejak 2020 menjadi bagian dari Bangkok Bank Thailand. Dengan dukungan modal asing, Permata mengembangkan bisnis modern yang inklusif. CSR 2023 dijalankan melalui PermataHati, yang mencakup pelatihan difabel, pemberian beasiswa, dukungan UMKM, serta penghijauan kota. Program ini menegaskan komitmen Permata Bank dalam mendukung kesetaraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Data Dan Hasil Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis tingkat dan kualitas pengungkapan informasi terkait CSR, bukan hanya keberadaan programnya. Pengungkapan ini akan dievaluasi berdasarkan tiga aspek utama sesuai kerangka Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021: dampak ekonomi (GRI 200), dampak lingkungan (GRI 300), dan dampak sosial (GRI 400), dilengkapi dengan pengungkapan umum (GRI 100). Data untuk penelitian ini akan bersumber dari laporan keberlanjutan (sustainability report) dan laporan tahunan bank-bank sampel yang dipublikasikan pada tahun 2023. Metode analisis yang digunakan adalah content analysis kualitatif deskriptif, di mana 117 indikator dari GRI Standards 2021 akan menjadi alat ukur untuk mengidentifikasi dan menilai sejauh mana setiap bank mengungkapkan informasi CSR mereka.

Penelitian ini memiliki signifikansi ganda, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, studi ini akan memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi pertanggungjawaban sosial di sektor perbankan Indonesia, sekaligus memperkaya pemahaman tentang teori legitimasi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai praktik pengungkapan CSR di perbankan Indonesia.

5.2 Analisis Kualitatif Deskriptif

Berdasarkan analisis isi terhadap indikator GRI, diperoleh hasil penilaian yang mencerminkan sejauh mana masing-masing indikator diungkapkan oleh

perusahaan perbankan dalam 3 kategori utama lingkungan, sosial dan ekonomi yang menjadi objek penelitian. Nilai yang dihasilkan menunjukkan tingkat keterpenuhan indikator pada setiap bank sampel.

Adapun rincian hasil penilaian tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Hasil Analisis Data 3 Indikator Utama (Ekonomi, Lingkungan dan Sosial) Bank Pemerintah Dan Bank swasta

Bank Pemerintah						
No.	Nana Bank	Kode Saham	ekonomi	Lingkungan	sosial	Total
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	12	28	34	74
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	10	12	13	35
3.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	12	25	28	65
4.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS	7	13	22	42
5.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	BJTM	7	12	9	27
Total Bank Pemerintah			48	90	106	243
Rata-Rata Bank Pemerintah			9,6	18	21,2	48,6
Bank Swasta						
No.	Nama Bank	Kode Saham	Ekonomi	Lingkungan	sosial	Total
1.	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA	6	7	14	31
2.	PT Bank Ganesha Tbk	BGTG	6	9	6	23
3.	PT Bank maybank Indonesia Tbk	BNII	9	18	28	56
4.	PT Allo Bank Indonesia	BBHI	1	4	11	15
5.	PT Bank Raya Indonesia Tbk	AGRO	6	10	4	19
6.	PT Bank IBK Indonesia Tbk	AGRS	4	4	9	18
7.	PT Bank Jago Tbk	ARTO	10	12	20	40
8.	PT bank MNC Internasional Tbk	BABP	1	7	7	11
9.	PT Bank Neo Commerce Tbk	BBYB	2	4	7	13
10.	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	BCIC	6	6	7	20
11.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN	7	12	18	37
12.	PT Bank Permata Tbk	BNLI	4	5	4	13
Total Bank Swasta			62	98	134	296
Rata-Rata Bank Swasta			5,2	8,2	11,2	24,6

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel tersebut, indikator CSR GRI Standars yang paling banyak diungkapkan adalah indikator sosial yang menggambarkan informasi mengenai dampak sosial dari kegiatan perusahaan. Indikator ini menguraikan kepegawaian, keselamat dan kesehatan kerja, tenaga kerja atau manajemen, pendidikan dan pelatihan, keanekaragaman kesempatan setara, non diskriminasi, pekerja anak, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan, keselamatan pelanggan, pemasaran dan pembelaan, privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial ekonomi Bank Pemerintah 106 poin atau sebesar 21,2 persen dan Bank Swasta sebanyak 134 poin atau sebesar 11,2 persen.

Indikator berikutnya yang banyak diungkapkan yaitu indikator lingkungan Bank Pemerintah 90 poin atau sebesar 18 persen dan Bank Swasta sebanyak 100 poin atau sebesar 8,3 persen dan pengungkapan indikator terkecil adalah indikator ekonomi lingkungan Bank Pemerintah 48 poin atau sebesar 9,6 persen dan bank swasta 62 poin atau sebesar 5,2 persen. Pengungkapan indikator lingkungan yang kecil menunjukkan bahwa Rendahnya tingkat pengungkapan indikator ekonomi dalam laporan keberlanjutan dibandingkan dengan indikator sosial dan lingkungan mencerminkan adanya perbedaan prioritas serta pertimbangan strategis dalam penyusunan laporan CSR perusahaan, khususnya di sektor perbankan.

Indikator ekonomi dalam GRI, seperti GRI 201 hingga 205, umumnya memuat informasi yang bersifat sensitif dan strategis, seperti distribusi nilai ekonomi langsung, praktik pengadaan lokal, dan risiko korupsi. Informasi semacam ini sering kali dianggap sebagai rahasia perusahaan yang apabila diungkap secara

terbuka dapat memengaruhi daya saing atau persepsi investor. Selain itu, rendahnya pengungkapan indikator ekonomi juga dapat disebabkan oleh asumsi bahwa aspek ekonomi telah banyak dibahas dalam laporan tahunan (laporan tahunan), sehingga perusahaan lebih memfokuskan laporan keberlanjutannya pada isu sosial dan lingkungan yang belum banyak tercakup dalam laporan keuangan utama.

5.2.1 Indikator Ekonomi

Indikator ekonomi dalam GRI Standards 2021 merupakan seperangkat informasi yang digunakan untuk mengungkapkan kinerja ekonomi organisasi, baik dalam bentuk kontribusi langsung seperti nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan, maupun dampak tidak langsung seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. GRI menekankan bahwa pengungkapan indikator ekonomi harus didasarkan pada topik-topik yang material bagi organisasi, serta bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial organisasi terhadap pemangku kepentingan.

Dengan demikian, indikator ekonomi tidak hanya menggambarkan performa finansial, tetapi juga mencerminkan bagaimana organisasi menjalankan praktik usaha yang etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi pengungkapan aspek ekonomi berdasarkan GRI Standards pada sektor perbankan memiliki nilai berbeda di tiap perusahaan dalam laporan keberlanjutan dan laporan keberlanjutan. Berdasarkan data yang tersaji Daftar lengkap data dapat dilihat pada bagian lampiran 4.

Tabel 5.2 Hasil Analisis Pemenuhan Topik Pada Indikator Ekonomi

Berdasarkan GRI Standards di Perbankan Tahun 2023 Bank Pemerintah Dan swasta

Bank Pemerintah									
No.	Nama Bank	Kode Saham	kinerja Ekonomi	Keberadaan Pasar	Dampak Ekonomi Tidak langsung	Praktik Pengadaan	Anti Korupsi	Perilaku Persaingan	TOTAL
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	4	2	2	0	2	1	12
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	4	0	2	1	3	0	10
3.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	4	2	2	1	3	0	12
4.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS	3	0	1	1	2	0	7
5.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	BJTM	4	0	0	0	3	0	7
Total Tiap Kategori			19	4	7	3	13	1	48
Rata-Rata Bank Pemerintah			3,8	0,8	1,4	0,6	2,6	0,2	9,6
Bank Swasta									
1.	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA	2	0	1	0	3	0	5
2.	PT Bank Ganesha Tbk	BGTG	4	0	2	0	0	0	6
3.	PT Bank maybank Indonesia Tbk	BNII	3	0	2	0	3	1	9
4.	PT Allo Bank Indonesia	BBHI	1	0	0	0	0	0	1
5.	PT Bank Raya Indonesia Tbk	AGRO	4	0	0	0	2	0	6
6.	PT Bank IBK Indonesia Tbk	AGRS	4	0	0	0	0	0	4
7.	PT Bank Jago Tbk	ARTO	4	2	2	1	3	0	12
8.	PT bank MNC Internasional Tbk	BABP	1	0	0	0	0	0	1
9.	PT Bank Neo Commerce Tbk	BBYB	0	0	0	0	0	1	1
10.	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	BCIC	2	2	1	1	0	0	6
11.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN	4	0	2	0	1	0	7
12.	PT Bank Permata Tbk	BNLI	1	0	1	0	2	0	4
Total Tiap Kategori			30	4	11	2	14	2	62
Rata-Rata Bank Swasta			2,5	0,3	0,9	0,1	1,1	0,1	5,2

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan penelitian diatas, Berbanding terbalik dengan bank Pemerintah, bank swasta menunjukkan rata-rata pengungkapan indikator ekonomi sebesar 5,2 jauh lebih rendah dari Pemerintah yaitu sebesar 9,6 yaitu terdapat selisih sebesar 4,4%. Hal ini mencerminkan bahwa bank swasta masih memiliki tantangan dalam mengimplementasikan pengungkapan yang sesuai dengan standar keberlanjutan internasional. Topik dengan skor tertinggi di bank swasta adalah Kinerja Ekonomi dengan rata-rata 2,5. Beberapa bank swasta yang menunjukkan pengungkapan penuh pada topik ini antara lain: PT Bank Ganesha (BGTG), PT Bank Jago (ARTO), dan PT Bank Danamon Indonesia (BDMN). Namun, swasta hanya mengungkapkan sebagian dari elemen-elemen kinerja ekonomi yang seharusnya disampaikan.

PT Bank Jago Tbk (ARTO) menempati posisi tertinggi dalam pengungkapan indikator ekonomi dengan total skor 12 poin, setara dengan bank Pemerintah terbaik, BBTN. Bank ini mengungkapkan seluruh topik ekonomi secara lengkap, termasuk topik yang jarang diungkap seperti praktik pengadaan dan perilaku antipersaingan. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi Topik Dampak Ekonomi memperoleh rata-rata 0,9, lebih rendah dari bank Pemerintah. Hanya beberapa bank seperti PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BN) Pada topik anti-korupsi, rata-rata skor bank swasta adalah 1,1. Mayoritas bank hanya mengungkapkan sebagian, dan bahkan beberapa bank seperti PT Bank Ganesha (BGTG) dan PT Bank MNC Internasional (BABP) mencatat skor 0. Hanya bank tertentu seperti PT Bank Jago dan PT Bank Maybank Indonesia yang

mencatat skor penuh 3, yang menunjukkan bahwa praktik anti-korupsi belum menjadi perhatian utama bagi sebagian besar bank swasta.

Terdapat juga bank-bank swasta yang mencatat pengungkapan terendah, seperti PT Allo Bank Indonesia (BBHI), PT Bank MNC Internasional (BABP), dan PT Bank Neo Commerce (BBYB), yang masing-masing hanya memperoleh total 1 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa bank swasta belum mengimplementasikan prinsip keberlanjutan secara optimal dalam pelaporan ekonomi mereka. Secara keseluruhan, bank Pemerintah menunjukkan performa pengungkapan yang lebih konsisten dan tinggi dibandingkan dengan bank swasta. Dengan rata-rata skor sebesar 9,4 larang Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (pemerintah atau swasta) bukan satu-satunya faktor penentu dalam pengungkapan keberlanjutan. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta strategi keberlanjutan internal menjadi kunci utama dalam menentukan sejauh mana perusahaan, khususnya perbankan, mengungkapkan aspek-aspek ekonomi sesuai dengan GRI Standards.

5.2.2 Indikator Lingkungan

Indikator Lingkungan berdasarkan GRI Standars merupakan indikator pengungkapan informasi terkait dampak lingkungan kegiatan perusahaan, secara keseluruhan, pada indikator ini terdiri dari 7 indikator yaitu; Material, Energi dan Efluen, Keanekaragaman Hayati, Emisi, Limbah, Penilaian Lingkungan Pemasok. Berikut merupakan hasil analisis pemenuhan penerapan indikator ini di tahun 2023

berdasarkan GRI Standards 2021 dalam annual report dan sustainability report perusahaan.

Tabel 5.3 Hasil Analisis Pemenuhan Topik Pada Indikator Lingkungan Berdasarkan GRI Standards di Perbankan Tahun 2023 Bank Pemerintah Dan Bank Swasta

Bank Pemerintah										
No	Nama Bank	Kode Saham	Material	Energi	Air Dan Efluen	Keaneka-ragaman hayati	Emisi	Limbah	Penilaian Lingkungan pemsok	Total
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	1	4	5	4	7	5	2	28
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	0	5	0	0	7	0	0	12
3.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	3	5	5	0	7	5	0	25
4.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS	0	2	3	1	3	4	6	13
5.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	BJTM	0	5	0	0	7	0	0	12
Total Tiap Kategori			4	21	13	5	31	14	8	90
Rata-Rata Pemerintah			0,8	4,2	2,6	1	6,2	2,8	1,6	18
Bank Swasta										
No.	Nama Bank	KODE SAHAM	Material	Energi	Air Dan Efluen	Keaneka-ragaman hayati	Emisi	Limbah	Penilaian Lingkungan pemsok	Total
1.	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA	0	2	2	0	3	0	0	7
2.	PT Bank Ganesha Tbk	BGTG	0	1	1	0	3	4	0	9
3.	PT Bank maybank Indonesia Tbk	BNII	0	4	5	2	4	3	0	18
4.	PT Allo Bank Indonesia	BBHI	0	3	1	0	0	0	0	4
5.	PT Bank Raya Indonesia Tbk	AGRO	0	5	1	0	1	3	0	10
6.	PT Bank IBK Indonesia Tbk	AGRS	0	1	1	0	2	0	0	4
7.	PT Bank Jago Tbk	ARTO	0	5	0	0	7	0	0	12
8.	PT bank MNC Internasional Tbk	BABP	0	3	1	0	2	1	0	7
9.	PT Bank Neo Commerce Tbk	BBYB	0	2	0	0	2	0	0	4
10.	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	BCIC	1	1	3	1	1	0	0	6
11.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN	1	5	0	0	5	1	0	12
12.	PT Bank Permata Tbk	BNLI	0	1	1	0	3	0	0	5
Total tiap kategori			1	33	16	3	33	12	0	98
Rata-Rata Swasta			0,0	2,75	1,3	0,25	2,75	1	0	8,2

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengungkapan indikator lingkungan pada bank pemerintah dan swasta tahun 2023, bank pemerintah menunjukkan rata-rata pengungkapan indikator lingkungan sebesar 18%, jauh lebih tinggi dari Swasta sebesar 8,2% terdapat selisih sebesar 9,8%. ditemukan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat skor tertinggi dengan total nilai 28. Hal ini menunjukkan bahwa BBNI memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dalam aspek lingkungan, khususnya pada indikator emisi dan limbah, serta menunjukkan perhatian pada air dan efluen serta keanekaragaman hayati. Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) hanya memperoleh skor 12, dengan dominasi pengungkapan pada indikator emisi dan tanpa kontribusi pada lima dari tujuh indikator lingkungan lainnya. Hal ini menunjukkan ketimpangan fokus pengungkapan yang cenderung terbatas pada isu tertentu. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memperlihatkan kinerja yang cukup baik dengan total skor 25, ditandai dengan skor tinggi pada emisi, air dan efluen, serta limbah. Bank ini menampilkan cakupan pengungkapan yang relatif merata, meskipun belum menyentuh aspek keanekaragaman hayati dan penilaian lingkungan pemasok secara signifikan.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menunjukkan skor 13 dengan keunggulan pada penilaian lingkungan pemasok, namun belum maksimal dalam pengungkapan aspek lainnya. Terakhir, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) mencatat skor terendah di antara bank pemerintah dengan nilai 12, di mana hanya indikator emisi yang diungkapkan secara signifikan, sementara enam indikator lainnya tidak mendapatkan perhatian.

Jika dibandingkan dengan bank swasta, perbedaan yang mencolok terlihat dalam hal total pengungkapan. Bank pemerintah mencatat rata-rata total skor sebesar 40, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata bank swasta yang hanya mencapai 8,2. Hal ini menandakan bahwa bank-bank pemerintah secara umum lebih aktif dan komprehensif dalam memenuhi standar pengungkapan lingkungan GRI 2021. Pada indikator emisi, bank pemerintah mencatat rata-rata 6,2 sementara bank swasta hanya 2,75. Tren serupa terlihat pada indikator limbah (2,8 vs 1) dan penilaian lingkungan pemasok (1,6 vs 0), menunjukkan bahwa bank pemerintah lebih proaktif dalam mengelola dampak lingkungan operasional dan rantai pasok mereka. Meski demikian, bank swasta menunjukkan kinerja relatif kompetitif pada indikator energi dan air, yang mencerminkan upaya awal mereka dalam merespon isu efisiensi sumber daya. Meskipun terdapat beberapa bank swasta yang mencatat skor cukup baik seperti PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank Jago Tbk, sebagian besar lainnya masih belum secara konsisten mengungkapkan tanggung jawab lingkungannya. Fakta bahwa tidak ada satupun bank swasta yang mengungkap indikator penilaian lingkungan pemasok menunjukkan adanya celah besar dalam penerapan praktik berkelanjutan di sektor swasta.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa bank-bank pemerintah menunjukkan kinerja pengungkapan lingkungan yang lebih unggul dibandingkan bank-bank swasta. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi dan dorongan kebijakan pemerintah untuk menjalankan prinsip keberlanjutan secara lebih ketat. Namun, masih terdapat disparitas antar bank pemerintah sendiri, yang mengindikasikan perlunya harmonisasi kebijakan dan

peningkatan konsistensi pengungkapan agar seluruh lembaga keuangan dapat secara kolektif mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia.

5.2.3 Indikator Sosial

Indikator sosial dalam GRI Standards 2021 merupakan bagian penting dalam pelaporan keberlanjutan yang berfokus pada pengungkapan informasi mengenai dampak sosial yang timbul dari aktivitas bisnis suatu perusahaan terhadap pekerja, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam versi GRI 2021, indikator sosial mencakup 19 topik material yang tersebar dalam beberapa seri GRI, seperti GRI 401 hingga GRI 418. Topik-topik tersebut meliputi praktik ketenagakerjaan dan kondisi kerja (misalnya kepegawaian, hubungan tenaga kerja dan manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan), perlakuan terhadap hak asasi manusia (termasuk non-diskriminasi, kebebasan berserikat, pekerja anak, kerja paksa, dan hak masyarakat adat), serta tanggung jawab terhadap pelanggan dan masyarakat (seperti penilaian dampak sosial pemasok, privasi pelanggan, pemasaran dan pelabelan, serta kepatuhan sosial ekonomi).

Setiap topik dirancang untuk menggambarkan sejauh mana organisasi bertanggung jawab dalam mencegah dan mengelola risiko sosial serta menciptakan nilai positif bagi masyarakat. Dalam konteks industri perbankan, pengungkapan atas indikator-indikator sosial tersebut menunjukkan bagaimana lembaga keuangan menjamin perlindungan hak tenaga kerja, menjaga integritas relasi pelanggan, serta memastikan keberlanjutan sosial dalam rantai pasok dan komunitas tempat mereka

beroperasi. Tingkat pemenuhan indikator sosial ini sangat bervariasi antar perusahaan perbankan, bergantung pada kebijakan internal, tingkat pemahaman terhadap GRI Standards, serta komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Hasil pengungkapan indikator sosial umumnya disampaikan melalui *annual report* maupun *sustainability report* masing-masing bank. Berikut akan disajikan analisis pemenuhan indikator sosial berdasarkan standar GRI 2021 oleh sektor perbankan pada tahun pelaporan yang relevan.

Tabel 5.4 Hasil Analisis Pemenuhan Topik Pada Indikator Sosial Berdasarkan GRI Standards di Perbankan Tahun 2023 Bank Pemerintah Dan Bank Swasta

Bank Pemerintah																				
No.	Nama Bank	Kode Saham	(1-3) 401	(1) 402	(1-10) 403	(1-3) 404	(1-2) 405	(1) 406	(1) 407	(1) 408	(1) 409	(1) 410	(1) 411	(1-2) 413	(1) 414	(1-2) 415	(1-2) 416)	(1-3) 417)	(1) 418	Total
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	3	1	10	3	1	1	1	1	1	0	1	2	2	1	2	3	1	34
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	3	0	0	3	0	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	13
3.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	3	0	10	3	2	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	3	1	28
4.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS	2	1	7	3	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	1	22
5.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	BJTM	3	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9
Total Tiap Kategori			15	2	27	16	5	4	3	4	4	1	1	7	2	1	2	9	5	106
Rata-Rata Bank Pemerintah			3	0,4	5,4	3,2	1	0,8	0,6	0,8	0,8	0,2	0,2	1,4	0,4	0,2	0,4	1,8	1	21,2
Bank Swasta																				
No.	Nama Bank	Kode Saham	(1-3) 401	(1) 402	(1-10) 403	(1-3) 404	(1-2) 405	(1) 406	(1) 407	(1) 408	(1) 409	(1) 410	(1) 411	(1-2) 413	(1) 414	(1-2) 415	(1-2) 416	(1-3) 417	(1) 418	Total
1.	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA	3	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	14
2.	PT Bank Ganesha Tbk	BGTG	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
3.	PT Bank maybank Indonesia Tbk	BNII	3	0	10	3	2	1	1	1	1	0	0	2	0	0	2	1	1	28
4.	PT Allo Bank Indonesia	BBHI	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	11
5.	PT Bank Raya Indonesia Tbk	AGRO	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6.	PT Bank IBK Indonesia Tbk	AGRS	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7.	PT Bank Jago Tbk	ARTO	3	1	0	3	2	1	0	1	1	0	0	2	2	0	0	3	1	20
8.	PT bank MNC Internasional Tbk	BABP	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	7
9.	PT Bank Neo Commerce Tbk	BBYB	1	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
10.	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	BCIC	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	7
11.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN	1	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	18
12.	PT Bank Permata Tbk	BNLI	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Total Tiap kategori			18	1	38	20	11	3	1	4	5	1	0	10	2	0	8	6	8	134
Rata-Rata Bank Swasta			1,5	0,0	3,7	1,7	0,9	0,25	0,0	0,3	0,4	0,0	0	0,8	0,7	0	0,76	0,5	0,7	11,2

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengungkapan indikator lingkungan pada bank pemerintah dan swasta tahun 2023, nilai rata-rata bank pemerintah sebesar 21,2 yang dimana lebih tinggi dari bank swasta yaitu sebesar 11,2 dengan selisih sebesar 10%. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) merupakan bank pemerintah dengan tingkat pengungkapan indikator sosial tertinggi, yakni sebesar 34 poin. Pengungkapan tertinggi terdapat pada GRI 403 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan skor penuh 10 poin, diikuti oleh pengungkapan konsisten pada GRI 401 (Kepegawaian), GRI 404 (Pelatihan dan Pendidikan), dan GRI 416 (Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan). Hal ini menunjukkan bahwa BBNI menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga kerja serta perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, BBNI juga mengungkap indikator-indikator hak asasi manusia dan praktik sosial lainnya secara merata, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.

Di posisi kedua, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatat skor 28 poin, dengan kekuatan pengungkapan juga terletak pada GRI 403 serta kontribusi positif pada indikator pelatihan, kesehatan pelanggan, dan kepegawaian. Namun, bank ini masih memiliki kekurangan dalam pengungkapan pada topik-topik seperti penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, dan hak masyarakat adat. Selanjutnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mengumpulkan 22 poin, dengan pengungkapan cukup baik pada aspek kesehatan kerja, pelatihan, dan nondiskriminasi, namun minim atau nihil pada indikator penilaian sosial rantai pasok dan perlindungan hak masyarakat. Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) hanya mencatat 13 poin, dengan

pengungkapan yang sangat terbatas dan cenderung terfokus pada aspek dasar seperti kepegawaian dan pelatihan, sementara sebagian besar topik sosial lainnya tidak diungkapkan. Yang paling rendah adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) dengan hanya 9 poin, menandakan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sangat terbatas dan belum mencerminkan praktik pelaporan sesuai GRI secara menyeluruh

Dibandingkan dengan bank pemerintah, bank swasta secara umum menunjukkan tingkat pengungkapan indikator sosial yang lebih rendah. Rata-rata total skor bank pemerintah adalah 21,2 poin, sedangkan bank swasta hanya mencapai 11,25 poin. Dari bank swasta, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) tampil paling menonjol dengan total skor 28 poin, yang bahkan menyamai skor BBTN, salah satu bank pemerintah tertinggi. Maybank mencatat skor sempurna pada GRI 403 dan pengungkapan merata pada beberapa topik penting seperti kepegawaian, pelatihan, non-diskriminasi, serta kesehatan pelanggan. Hal ini menandakan bahwa beberapa bank swasta, khususnya yang memiliki afiliasi internasional, telah mulai menerapkan praktik pelaporan yang komprehensif sesuai dengan standar global. Bank swasta lain yang juga relatif baik adalah PT Bank Jago Tbk (ARTO) dengan skor 20 poin, menunjukkan keterbukaan yang baik terhadap isu pelatihan, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat.

Sementara itu, sebagian besar bank swasta lainnya masih menunjukkan kinerja pengungkapan yang sangat rendah. Misalnya, PT Bank Permata Tbk (BNLI) hanya mencatat skor 4 poin, dengan pengungkapan terbatas pada topik pelatihan dan kesehatan pelanggan. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO), PT Bank MNC

Internasional Tbk (BABP), dan PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) juga hanya mencatat skor antara 4 hingga 7 poin, yang menunjukkan minimnya transparansi terhadap dampak sosial kegiatan usaha mereka. Beberapa indikator kritis seperti penilaian HAM (GRI 412), kebijakan publik (GRI 415), serta penilaian sosial pemasok (GRI 414) bahkan tidak diungkapkan sama sekali oleh sebagian besar bank swasta.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Indikator Ekonomi (GRI 200)

Indikator ekonomi berfokus pada bagaimana kontribusi ekonomi suatu organisasi tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas. Enam topik utama dalam indikator ini meliputi: Kinerja Ekonomi (GRI 201), Keberadaan Pasar (GRI 202), Dampak Ekonomi Tidak Langsung (GRI 203), Praktik Pengadaan (GRI 204), Anti-Korupsi (GRI 205), dan Perilaku Persaingan (GRI 206).

Bank pemerintah mencatat rata-rata pengungkapan sebesar 9,4 poin. PT Bank Tabungan Negara (BBTN) mencatat skor tertinggi (12 poin), diikuti oleh PT Bank Negara Indonesia (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI). Sementara bank swasta secara umum mencatat skor lebih rendah, rata-rata hanya 5,1 poin. Namun, terdapat pengecualian seperti PT Bank Jago Tbk (ARTO) yang mencatat skor 12 poin, setara dengan BBTN. Skor tinggi pada indikator ekonomi di kalangan bank pemerintah menunjukkan adanya perhatian yang relatif konsisten terhadap aspek pembangunan ekonomi,

termasuk pengungkapan nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan serta komitmen terhadap praktik anti-korupsi.

Sebaliknya, pada bank swasta, pengungkapan terhadap indikator seperti keberadaan pasar dan perilaku persaingan masih sangat terbatas. Bahkan banyak bank yang tidak mengungkapkan sama sekali mengenai praktik pengadaan lokal atau perilaku antipersaingan. Ini menunjukkan bahwa isu-isu yang bersifat strategis dan bersinggungan dengan kerahasiaan kompetitif masih dianggap sensitif untuk diungkap secara terbuka dalam laporan keberlanjutan.

Penelitian terdahulu, seperti Salsabila (2021) dan Janah (2021), hanya menyoroti adanya perbedaan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan swasta secara umum tanpa membedah detail aspek ekonomi. Pramudito & Wibowo (2023) memang menekankan kontribusi CSR terhadap keberlanjutan ekonomi, namun tidak mengacu pada standar GRI. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan perbedaan nyata melalui pengukuran terstruktur bank pemerintah unggul dengan rata-rata 9,4 poin, sedangkan bank swasta hanya 5,1 poin. Hasil ini membuktikan bahwa pengungkapan ekonomi pada bank pemerintah lebih konsisten terutama pada aspek kinerja ekonomi dan anti-korupsi, sementara bank swasta masih terbatas, khususnya pada isu strategis seperti perilaku persaingan dan praktik pengadaan.

5.3.2 Indikator Lingkungan (GRI 300)

Indikator lingkungan dalam GRI 2021 bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana aktivitas organisasi berdampak pada ekosistem fisik. Terdapat tujuh topik yang dievaluasi, yaitu: Material (GRI 301), Energi (GRI 302), Air dan Efluen (GRI 303), Keanekaragaman Hayati (GRI 304), Emisi (GRI 305), Limbah (GRI 306), dan Penilaian Lingkungan Pemasok (GRI 308).

Bank pemerintah mencatat skor rata-rata 40 poin untuk indikator lingkungan, jauh di atas rata-rata bank swasta sebesar 8,2 poin. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) kembali menjadi yang tertinggi dalam pengungkapan (28 poin), menunjukkan bahwa bank ini memiliki strategi pelaporan yang holistik dan terintegrasi pada isu lingkungan. Indikator yang paling sering diungkap adalah emisi dan energi, sedangkan topik seperti keanekaragaman hayati dan penilaian lingkungan pemasok cenderung diabaikan, terutama oleh bank swasta.

Bank swasta dengan skor tertinggi dalam kategori ini adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) dan PT Bank Jago Tbk (ARTO), yang masing-masing mencatat 18 dan 12 poin. Namun, mayoritas bank swasta mencatat skor rendah, bahkan nihil pada aspek seperti penilaian lingkungan pemasok dan keanekaragaman hayati. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa bank swasta masih belum mengintegrasikan isu lingkungan secara pelaporan mereka, kemungkinan karena ketiadaan regulasi yang mengikat atau keterbatasan kapasitas internal.

Penelitian sebelumnya pada umumnya belum mengupas secara detail aspek lingkungan, bahkan cenderung hanya menilai CSR sebagai bentuk kepatuhan atau strategi reputasi. Berbeda dengan itu, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa bank pemerintah jauh lebih unggul (40 poin) dibandingkan bank swasta (8,2 poin) dalam pengungkapan lingkungan. Perbedaan mencolok terlihat pada pengungkapan energi dan emisi yang cukup konsisten pada bank pemerintah, sementara bank swasta masih minim, bahkan seringkali tidak mengungkap sama sekali isu penting seperti keanekaragaman hayati dan penilaian lingkungan pemasok.

5.3.3 Indikator Sosial (GRI 400)

Indikator sosial dalam GRI 2021 mencakup 19 topik yang berkaitan dengan pengaruh organisasi terhadap masyarakat, tenaga kerja, dan konsumen. Topik-topik utama meliputi Kepegawaian (GRI 401), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (GRI 403), Pelatihan dan Pendidikan (GRI 404), Non-Diskriminasi (GRI 406), Pekerja Anak (GRI 408), Penilaian Sosial Pemasok (GRI 414), dan Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan (GRI 416). Bank pemerintah mencatat skor rata-rata tertinggi dalam kategori ini yaitu 21,2 poin, dibandingkan dengan bank swasta yang hanya memperoleh rata-rata 11,25 poin. PT Bank Negara Indonesia (BBNI) menjadi bank dengan pengungkapan sosial tertinggi (34 poin), yang menunjukkan bahwa aspek sosial menjadi fokus utama dalam pelaporan keberlanjutannya. BBNI secara eksplisit mengungkapkan berbagai

indikator seperti keselamatan kerja, pelatihan karyawan, serta penilaian sosial rantai pasok.

Sebaliknya, mayoritas bank swasta hanya mengungkapkan indikator sosial yang bersifat dasar, seperti kepegawaian dan pelatihan. Topik-topik yang bersifat strategis seperti kebijakan publik (GRI 415) dan perlindungan HAM (GRI 412) cenderung tidak diungkap. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar bank swasta masih memandang pengungkapan sosial sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat manajemen keberlanjutan strategis.

Penelitian terdahulu menekankan CSR sebagai sarana membangun reputasi dan keberlanjutan sosial, namun belum membedakan topik-topik spesifik dalam indikator sosial GRI. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan yang lebih tajam: bank pemerintah mencatat rata-rata 21,2 poin, sedangkan bank swasta hanya 11,25 poin. Bank pemerintah lebih menonjol dalam pengungkapan aspek kepegawaian, keselamatan kerja, pelatihan, dan rantai pasok, sedangkan bank swasta cenderung hanya mengungkap isu dasar, meninggalkan isu strategis seperti perlindungan HAM, kebijakan publik, dan kesehatan pelanggan. Hal ini menegaskan bahwa penelitian sekarang tidak hanya mengonfirmasi perbedaan, tetapi juga memetakan tingkat kedalaman pengungkapan sosial yang dilakukan masing-masing jenis bank.

5.3.4 Pembahasan Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI Standards 2021

Penelitian ini secara menyeluruh mengkaji tingkat pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada sektor perbankan di Indonesia tahun 2023 berdasarkan tiga pilar utama dari Global Reporting Initiative (GRI)

Standards 2021, yaitu indikator ekonomi (GRI 200), indikator lingkungan (GRI 300), dan indikator sosial (GRI 400). Analisis dilakukan terhadap 17 bank yang terdiri dari 5 bank pemerintah dan 12 bank swasta, dengan menggunakan pendekatan content analysis pada laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan yang tersedia secara publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara empiris bagaimana masing-masing entitas perbankan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank pemerintah memiliki performa pengungkapan CSR yang lebih unggul dibandingkan dengan bank swasta. Hal ini terlihat dari total skor rata-rata bank pemerintah sebesar 48,6 poin, sedangkan bank swasta hanya mencapai rata-rata 24,6 poin. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari kuantitas pengungkapan, tetapi juga pada keragaman indikator yang diungkapkan. Hasil ini mencerminkan kecenderungan tuntutan regulasi dan ekspektasi publik yang tinggi, lebih terstruktur dan proaktif dalam menyampaikan informasi keberlanjutan negara, karena tuntutan regulasi dan ekspektasi publik yang tinggi, lebih terstruktur dan proaktif dalam menyampaikan informasi keberlanjutan.

5.4 Perbandingan Menyeluruh antara Bank Pemerintah dan Swasta

Dari keseluruhan indikator yang dianalisis, jelas bahwa bank pemerintah menunjukkan performa pengungkapan yang lebih konsisten dan menyeluruh. Perbedaan mencolok terlihat pada indikator lingkungan dan sosial, di mana bank pemerintah memiliki keunggulan absolut. Hal ini sejalan dengan peran dan

kewajiban bank milik negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).

Namun demikian, keberadaan beberapa bank swasta yang mencatat skor tinggi menunjukkan bahwa faktor seperti afiliasi global, kesadaran reputasi, dan orientasi pasar yang kompetitif juga berperan dalam mendorong pengungkapan CSR yang baik. Contohnya, PT Bank Jago dan PT Maybank Indonesia telah menunjukkan pengungkapan indikator yang setara dengan bank pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional bukan satu-satunya determinan utama, tetapi strategi internal dan tata kelola perusahaan turut berperan penting dalam memengaruhi kualitas pelaporan CSR.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) antara bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia tahun 2023 berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021*, yang mencakup tiga aspek utama: ekonomi, lingkungan, dan sosial.

1. Pengungkapan CSR Bank Pemerintah dan Swasta Berbeda Secara Signifikan.
Hasil analisis konten dari laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara bank pemerintah dan bank swasta dalam pengungkapan CSR. Bank pemerintah lebih dominan dalam mengungkapkan indikator sosial dan lingkungan. Hal ini mencerminkan peran aktif bank milik negara dalam menyokong kebijakan pembangunan berkelanjutan pemerintah, terutama dalam program-program sosial seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendidikan keuangan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
2. Bank Swasta Lebih Unggul dalam Pengungkapan Ekonomi dan Lingkungan.
Di sisi lain, bank swasta menunjukkan keunggulan dalam aspek ekonomi, terutama dalam inovasi keuangan berkelanjutan, pembiayaan proyek hijau, serta efisiensi energi. Beberapa bank swasta besar juga memiliki pengungkapan lingkungan yang signifikan, khususnya pada pendanaan obligasi hijau (*green bonds*) dan pengurangan jejak karbon operasional.

3. Pengaruh regulasi dan kepemilikan terhadap CSR tingkat kepatuhan yang lebih tinggi pada bank pemerintah dipengaruhi oleh faktor regulasi yang ketat, pengawasan publik, dan mandat sosial sebagai entitas negara. Sebaliknya, bank swasta memiliki fleksibilitas lebih tinggi dan cenderung mengutamakan aspek ekonomi, kecuali terdapat tekanan dari investor atau tuntutan pasar. Bank yang tergabung dalam indeks keberlanjutan seperti SRI-KEHATI juga menunjukkan pengungkapan CSR yang lebih komprehensif.
4. Standar GRI 2021 sebagai regulasi Evaluasi Penggunaan standar GRI 2021 memungkinkan evaluasi yang lebih sistematis dan terstruktur terhadap aspek keberlanjutan. Melalui tiga kategori utama dalam GRI (GRI 200 - Ekonomi, GRI 300 - Lingkungan, dan GRI 400 - Sosial), penelitian ini berhasil mengungkap kecenderungan dan fokus CSR dari masing-masing jenis bank.
5. CSR sebagai Strategi Keberlanjutan Jangka Panjang CSR bukan hanya alat reputasi, tetapi telah menjadi bagian integral dalam strategi bisnis dan keberlanjutan bank. Bank-bank yang aktif mengungkap CSR menunjukkan potensi besar dalam menarik kepercayaan masyarakat, meningkatkan loyalitas nasabah, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada bank pemerintah dan swasta di Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif bagi berbagai pihak terkait:

1. Bank pemerintah perlu memperkuat aspek ekonomi seperti transparansi dana dan pemberdayaan lokal. Bank swasta disarankan lebih aktif di aspek sosial, seperti inklusi keuangan dan perlindungan konsumen. Ketiganya (ekonomi, sosial, lingkungan) harus diungkap secara seimbang sesuai dengan Standar GRI.
2. CSR sebaiknya diintegrasikan ke dalam strategi jangka panjang perusahaan, dengan indikator kinerja terukur untuk menciptakan dampak berkelanjutan dan memperkuat reputasi.
3. OJK, Kementerian BUMN, dan BEI perlu meningkatkan evaluasi kualitas CSR, mendorong penggunaan GRI sebagai standar nasional, serta memberikan insentif seperti penghargaan atau indeks keberlanjutan.
4. Pelatihan berkala dan pemanfaatan teknologi pelaporan perlu dilakukan agar pelaksanaan CSR lebih transparan, akuntabel, dan berdampak. Diperlukan sinergi antara bank, pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat lokal dalam menyusun dan menjalankan program CSR agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengkaji hubungan antara CSR dan kinerja keuangan, serta memperluas objek ke sektor lain seperti asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, Irma., & Berthomieu, Claude. (2019). *Stakeholder Theory and Organizational Ethics*. Berrett-Koehler Publishers.
- Anonim. (n.d.). *ISO 26000: Guidance on Social Responsibility*.
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *Laporan Keberlanjutan Perusahaan Terbuka di Indonesia*. Global Reporting Initiative. (2000–2021). *Sejarah dan Perkembangan Standar GRI*.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI Standards 2021*. Global Sustainability Standards Board (GSSB).
- Hariyanti, L., et al. (2021). Perbandingan Kepatuhan Bank terhadap Standar GRI di Indonesia. *Journal of Finance and Banking*.
- Indonesia Stock Exchange. (2021). *Indeks SRI-KEHATI dan Implementasi ESG di Pasar Modal Indonesia*.
- Janah, A. (2021). *Analisis Pelaksanaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan di Indonesia*.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Konsep Corporate*
- Manalu, A., et al. (2023). *@ : Theory and Practice*. Cambridge University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan*.
- Pramudito, A., & Wibowo, A. (2023). *CSR dan Keberlanjutan: Studi Kualitatif pada Bank- Bank di Indonesia*.
- Rusnawati, L. (2023). *Perbankan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Salsabila, S. T. (2021). *Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Perbankan Indonesia (Studi Komparatif Bank Pemerintah dan Bank Swasta)*.
- Sasongko, R., et al. (2023). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Keberlanjutan Perbankan di Indonesia. *Sustainable Finance Journal. Social Responsibility di Sektor Perbankan*.
- Totok Mardikanto. (2018). *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Widiastuti, T. (2023). *Implementasi CSR di Industri Perbankan: Studi Kasus Bank-Bank di Indonesia*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel Daftar Nama Bank Swasta dan Pemerintah

No	Kode Saham	Nama Bank	Kepemilikan
1.	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pemerintah
2.	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pemerintah
3.	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pemerintah
4.	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemerintah
5.	BRIS	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Pemerintah
6.	AGRO	PT Bank Raya Indonesai Tbk	Swasta
7.	AGRS	PT Bank IBK Indonesia Tbk	Swasta
8.	AMAR	PT Bank Amar Indonesia Tbk	Swasta
9.	ARTO	PT Bank Jago Tbk	Swasta
10.	BABP	PT Bank MNC Internasional Tbk	Swasta
11.	BACA	PT Bank Capital Indonesia Tbk	Swasta
12.	BANK	PT Bank Aladian Syariah Tbk	Swasta
13.	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	Swasta
14.	BBHI	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Swasta
15.	BBKP	PT Bank KB Bukopin Tbk	Swasta
16.	BBMD	PT Bank Mesitika Dharma Tbk	Swasta
17.	BBSI	PT Krom Bank Indonsia Tbk	Swasta
18.	BBYB	PT Bank Neo Commerce Tbk	Swasta
19.	BCIC	PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	Swasta
20.	BDMN	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Swasta
21.	BEKS	PT Bank Pembangunan D aerah Banten Tbk	Swasta
22.	BGTG	PT Bank Ganesha Tbk	Swasta
23.	BINA	PT Bank Ina Perdana Tbk	Swasta
24.	BJBR	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	Swasta
25.	BJTM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Swasta
26.	BKSW	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Swasta
27.	BMAS	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	Swasta
28.	BNBA	PT Bank Bumi Arta Tbk	Swasta
29.	BNGA	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Swasta
30.	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Swasta
31.	BSIM	PT Bank sinarmas Tbk	Swasta
32.	BSWD	PT Bank Of India Indonesia Tbk	Swasta
33.	BTPN	PT Bank BTPN Tbk	Swasta
34.	BTPS	PT Bank Syariah Tbk	Swasta
35.	BVIC	PT Bank Syariah Tbk	Swasta

36.	MCOR	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Swasta
37.	MEGA	PT Bank Mega Tbk	Swasta
38.	NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk	Swasta
39.	DNAR	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Swasta
40.	INPC	PT Bank Artha Graha International Tbk	Swasta
41.	MASB	PT Bank Multiartha Sentosa Tbk	Swasta
42.	MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Swasta
43.	NOBU	PT Bank Nasionalnubu Tbk	Swasta
44.	PNBS	PT Bank Pain Dubai Syariah Tbk	Swasta
45.	PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Swasta
46.	SDRA	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1960 TBK	Swasta
47.	BNLI	PT Bank Permata Tbk	Swasta

Lampiran 2

Pemilihan Sampel

No	Kode Saham	Nama Kode	Kepemilikan
1.	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pemerintah
2.	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pemerintah
3.	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pemerintah
4.	BRIS	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pemerintah
5.	BJTM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Pemerintah
6.	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	Swasta
7.	BGTG	PT Bank Ganesha Tbk	Swasta
8.	BNII	PT Bank maybank Indonesia Tbk	Swasta
9.	BBHI	PT Allo Bank Indoneisa Tbk	Swasta
10.	AGRO	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Swasta
11.	AGRS	PT Bank IBK Indonesia Tbk	Swasta
12.	ARTO	PT Bank Jago Tbk	Swasta
13.	BABP	PT bank MNC Internasional Tbk	Swasta
14.	BBYB	PT Bank Neo Commerce Tbk	Swasta
15.	BCIC	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Swasta
16.	BDMN	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Swasta
17.	BNLI	PT Bank Permata Tbk	Swasta

Lampiran 3

Syarat Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI 2021

No	GRI STANDAR 2021	DISCLOSURE
General Disclosures 2021		
1. Aspek: Organisasi dan praktik pelaporan		
1.	GRI 2: General Disclosure 2021	2-1 Rincian orgaisasi
2.		2-2 Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan
3.		2-3 Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan
4.		2-4 Penyajian kembali informasi
5.		2-5 Penjaminan eksternal
2. Aspek: Aktivitas dan pekerja		
6.	GRI 2: General Disclosure 2021	2-6 Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis
7.		2-7 Tenaga Kerja
8.		2-8 Pekerja yang bukan pekerja langsung
3. Aspek: Tata Kelola		
9.	GRI 2: General Disclosure 2021	2-9 Struktur dan komposisi tata kelola
10.		2-10 Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola
11.		2-11 Ketua badan tata kelola tertinggi
12.		2-12 Peran badan tata kelola tertinggi dalam
13.		2-13 Delegasi tanggung jawab untuk mengelola
14.		2-14 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
15.		2-15 Konflik kepentingan
16.		2-16 komunikasi masalah penting
17.		2-17 Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
18.		2-18 Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
19.		2-19 Kebijakan remunerasi
20.	2-20 Proses untuk menentukan remunerasi	
21.	2-21 Rasio kompensasi total tahunan	

22.	GRI 2: General Disclosure 2021	2-22 Pernyataan tentang strategi pembangunan
23.		2-23 Komitmen kebijakan
24.		2-24 Menanamkan komitmen kebijakan
25.		2-25 Proses untuk memperbaiki dampak negatif
26.		2-26 mekanisme untuk mencari nasihat dan
27.		2-27 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
28.		2-28 Asosiasi keanggotaan
29.		2-29 Pendekatan untuk keterlibatan pemangku
30.		2-30 Perjanjian penundaan kolektif
MATERIAL TOPICS		
31.	GRI 3: Topik Material 2021	3-1 Proses atau panduan untuk menentukan topik
32.		3-2 Daftar topik material
33.		3-3 Manajemen topik material
34.	GRI 202: Kinerja Ekonomi	201-1 Nilai ekonomi lingkung yang dihasilkan
35.		201-2 Implikasi finans
36.		201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
37.		201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
38.	GRI 202: Keberadaan	202-1 Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
39.		202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat
40.	GRI 203: Dampak	203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
41.		203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan

42.	GRI 204: Praktik Pengadaan	204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
43.	GRI 205: Antikorupsi	205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
44.		205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi
45.		205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
46.	GRI 207: Pajak	206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli
47.		207-1 Pendekatan terhadap pajak
48.		207-2 Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
49.		207-3 Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak
50.		207-4 Laporan per negara
51.	GRI 301: material	301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
52.		301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan
53.		301-3 Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
54.	GRI 302: Energi	302-1 Konsumsi energi dalam organisasi
55.		302-2 Konsumsi energi di luar organisasi
56.		302-3 Intensitas energi
57.		302-4 Pengurangan konsumsi energi

58.		302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
59.	GRI 303: Air dan Efluen	303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya Bersama
60.		303-2 Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
61.		303-3 Pengambilan air
62.		303-4 Pembuangan air
63.		303-5 Konsumsi air
64.	GRI 304: Keanekaragaman Hayati	304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
65.		304-2 Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
66.		304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi
67.		304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
68.	GRI 305: Emisi	305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
69.		305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
70.		305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
71.		305-5 Pengurangan emisi GRK
72.		305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS)

73.		305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS)
74.		305-7 Nitrogen oksida (NO _x), belerang oksida (SO _x), dan emisi udara signifikan lainnya
75.	GRI 306: Limbah	306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
76.		306-2 Manajemen dampak signifikan terkait limbah
77.		306-3 Timbulan limbah
78.		306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
79.		306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
80.	GRI 308: Penilaian	308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
81.		308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
82.	GRI 402: Kepegawaian	401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
83.		401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu
84.		401-3 Cuti melahirkan
85.	GRI 402:	402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
86.		403-1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja

87.		403-2 Pengungkapan, Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi Insiden	
88.	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja	403-3 Layanan kesehatan kerja	
89.		403-4 Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja	
90.		403-5 Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja	
91		403-6 Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	
92.		403-7 Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	
93.		403-8 Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	
94.		403-9 Kecelakaan kerja	
95.		403-10 Penyakit Akibat Kerja	
96.		GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
97.			404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
98.	404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier		
99.	GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara	405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	

100.		405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
101.	GRI 406: Nondiskriminasi	406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
102.	GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
103.	GRI 408: Pekerja Anak	408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
104.	GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja	409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
105.	GRI 410: Praktik Keamanan	410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
106.	GRI 411: Hak Masyarakat Adat	411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
107.	GRI 413: Masyarakat Setempat	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan
108.		413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi berdampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat
109.	GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok	414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
110.		414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
111.	GRI 415: Kebijakan Publik	415-1 Kontribusi politik

112.	GRI416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
113.		416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
114.	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan	417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
115.		417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
116.		417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
117.	GRI 418: Privasi Pelanggan	418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
$\sum Ni$	$\sum XYi$	
$=$ 117	$\sum XYi/ni$	

LAMPIRAN 4

Data Hasil pengungkapan CSR Bank Sampel Berdasarkan GRI 2021

DISCLOSURE GRI STANDARD 2021			BB NI	BB RI	BB TN	B RI S	BJ TM	BB CA	BG TG	B NI I	BB HI	AG RO	AG RS	AR TO	BA BP	BB YB	BC IC	BD MN	BN LI
34.	GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
35.		201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
36.		201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
37.		201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
38.	GRI 202: Keberadaan Pasar	202-1 Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
39.		202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
40.	GRI 203: Dampak Ekonom	203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

65.		304-2 Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66.		304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.		304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	GRI 305: Emisi	305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
69.		305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
70.		305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
71.		305-4 Intensitas emisi GRK	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
72.		305-5 Pengurangan emisi GRK	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
73.		305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS)	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
74.		305-7 Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
75.	GRI 306: Limbah	306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
76.		306-2 Manajemen dampak signifikan terkait limbah	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0

77.		306-3 Timbulan limbah	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
78.		306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.		306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok	308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.		308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	GRI 401: Kepegawaian	401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
83.		401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
84.		401-3 Cuti melahirkan	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
85.	GRI 402: Hubungan	402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

94.		403-9 Kecelakaan kerja	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.		403-10 Penyakit Akibat Kerja	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
97.		404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
98.		404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
99.	GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara	405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
100.		405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
101.	GRI 406: Nondiskriminasi	406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

107.	GRI 413: Masyarakat Setempat	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
108.		413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
109.	GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok	414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
110.		414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
111.	GRI 415: Kebijakan Publik	415-1 Kontribusi politik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan	416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0

	Pelanggan																			
.113.		416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
114.	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan	417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
115.		417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
116.		417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
117.	GRI 418: Privasi Pelanggan	418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1